



BPKPAD



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

فمرنته كبو فتن بنجر

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

بدن فقلولان كعواعن

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

فند فتن دن اسة دأیره

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

جَلَانْ. فَعِیْرَانْ هِدَايَةُ اللَّهِ نُومُورْ ۱. طَیْلَفُونْ (۱۱۵۰) ۸۵۳۱۲۷۴

Jl. Pangeran Hidayatullah No. 1 Telp (0511) 4721358 Fax. 4721027

Kode Pos 70611 Kalsel MARTAPURA e-mail : bpkpad.banjarkab@gmail.com

+62511 4721538

Jl. Pangeran Hidayatullah No.1. Martapura 70611

<https://bpkpad.banjarkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan strategis lima tahunan yang disusun untuk mendukung pencapaian visi **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN Keadilan”** serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi acuan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama lima tahun ke depan guna mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari unsur internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, instansi terkait, maupun masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen renstra ini.

Akhir kata, kami berharap Dokumen Renstra ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang berkelanjutan.

Martapura, 19 September 2025

Kepala Badan,



Dis. Ahmad Zulyadaini, M.Si
Nip. 19660104 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 35

2.2.1 Dukungan Sumber Daya Manusia..... 35

2.3 Sarana dan Prasarana 44

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 66

2.5 Pendapatan Asli Daerah 51

2.8 Pendapatan Transfer 54

2.9 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 54

2.10 Kelompok Sasaran Layanan dan Mitra Perangkat Daerah 55

2.11 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2026 56

2.11.1 Visi 65

2.11.2 Misi..... 66

2.11.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjar 67

2.12 Penentuan Isu-Isu Strategis dan Analisis Risiko Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 69

2.12.1 Penentuan Isu – Isu Strategis..... 69

2.12.2 Analisis Risiko Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah 72

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 76

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah (Renstra) 76

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 78

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 79

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 82

3.5 Penyandingan RPJMD Kabupaten Banjar, RPJMD Provinsi Kalimantan
Selatan dan RPJM Nasional 84

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 85

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator,
Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2029 85

4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu
Indikatif 129

4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah 177

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.. 204

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 206

BAB V PENUTUP..... 209

L A M P I R A N 211

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 7

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai BPKPAD Kabupaten Banjar Per Januari 2025 35

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2025 - 2030..... 79

Tabel 3. 2 Penetapan Renstra Perangkat Daerah 80

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 83

Tabel 3. 4 Penyandingan Visi dan Misi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
dan Indonesia 84

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah 74

Tabel 4. 2 Rencanana Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 130

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah 180

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
(LPPD) 205

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (LPPD) 206

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra 3

Gambar 1. 2 Keterkaitan RPJMD Renstra 3

Gambar 2. 1 Struktur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Banjar 11

Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah 77

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah 86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra tersebut disusun dengan mengacu dan menyelaraskan sebagian substansinya sebagai bagian integral dari dokumen RPJMD.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas dan Kemandirian Fiskal.

Terkait keselarasan Visi dan Misi dari RPJMN sebagai Asta Cita ke 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila Dan Hak Asasi Manusia dan Asta Cita ke 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan, untuk RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Misi ke 5 : Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah Dan Cepat dan untuk RPJMD

Kabupaten Banjar adalah Misi ke 2 yaitu Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan dan misi ke 4 yaitu : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Dan Birokrasi. Maka dari itu Renstra Perangkat Daerah BPKPAD harus selaras dalam penyusunannya sesuai dengan RPJMD yang sudah ditentukan.

Renstra BPKPAD mengampu misi ke 2 yaitu : Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menjaga Rasio PAD terhadap PDRB menunjukkan sejauh mana daerah bisa membiayai pembangunan dari sumber daya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

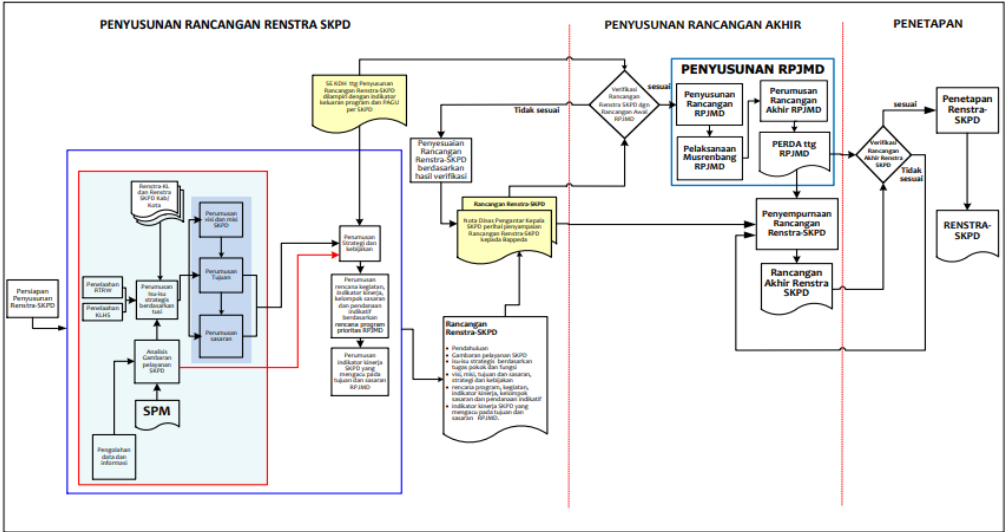
Renstra BPKPAD mengampu misi ke 4 yaitu : Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani dengan arah kebijakan Aparatus Sipil Negara (ASN) yang profesional, Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi, Melanjutkan pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keterangan, dan Memperkuat aksi pencegahan korupsi.

Renstra sebagai pengendalian kinerja juga berperan sebagai alat pengendalian. Ini berarti Renstra membantu organisasi untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar dan melakukan koreksi jika ada penyimpangan dan Renstra di Review secara berkala (periodik) untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya.

Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Pada tahap penetapan Renstra Perangkat Daerah, rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Proses penyusunan Renstra tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.1.

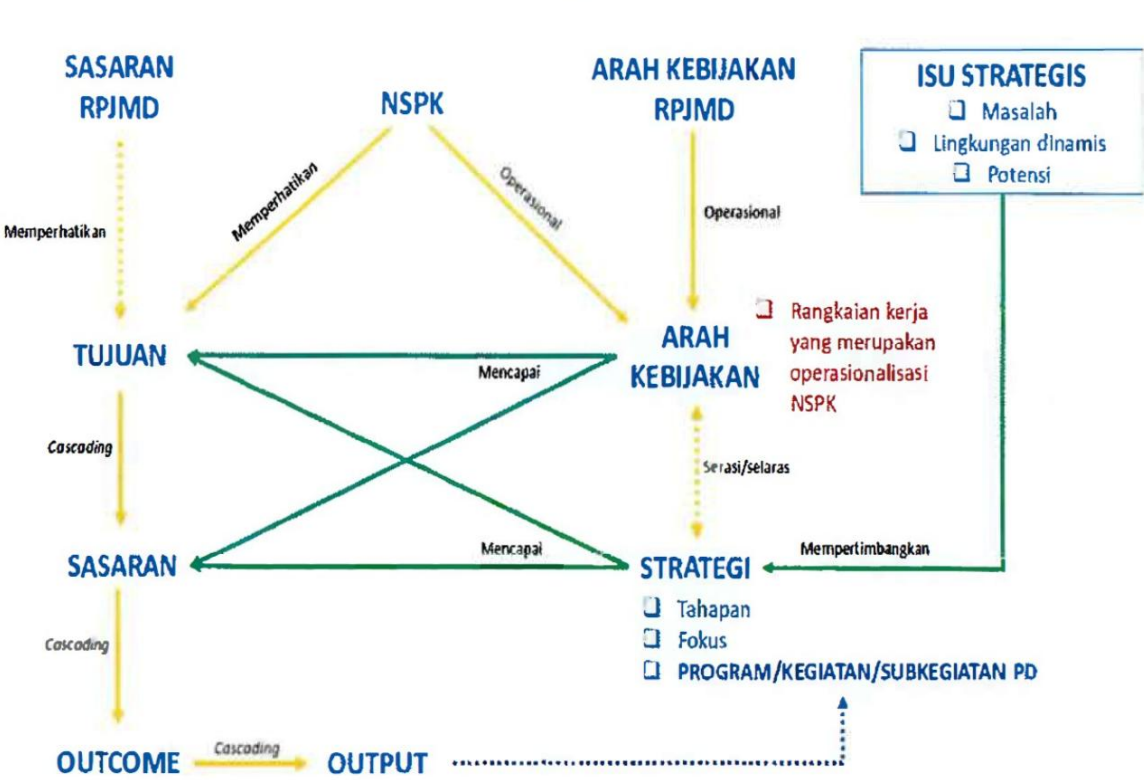
Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra



Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra dengan Renja Perangkat Daerah bisa digambarkan seperti gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1. 2 Keterkaitan RPJMD Renstra



Sumber Data : Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui

pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Melalui Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki panduan yang terarah dan terukur dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4); dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57)
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis SKPD pada tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah beserta *stakeholder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 adalah :

- 2.2Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3.2Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- 4.2Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang merupakan pedoman perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 5.2Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6.2Sebagai bahan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun berdasarkan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029

Bab	Penjelasan
Bab I Pendahuluan	1. Latar Belakang, 2. Dasar Hukum Penyusunan 3. Maksud dan Tujuan Penyusunan 4. Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Umum Daerah	1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Perangkat Daerah 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 4. Kelompok Sasaran Layanan 5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Strategi Perangkat Daerah 3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Bab IV Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan	1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah 2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah LPPD melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Bab V Penutup	Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) gabungan yang sebelumnya terdiri dari dua organisasi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021, pada pasal 27 ayat 2 dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 tahun 2021 pasal 27 ayat 2 fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pendapatan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan administrasi BPKPAD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

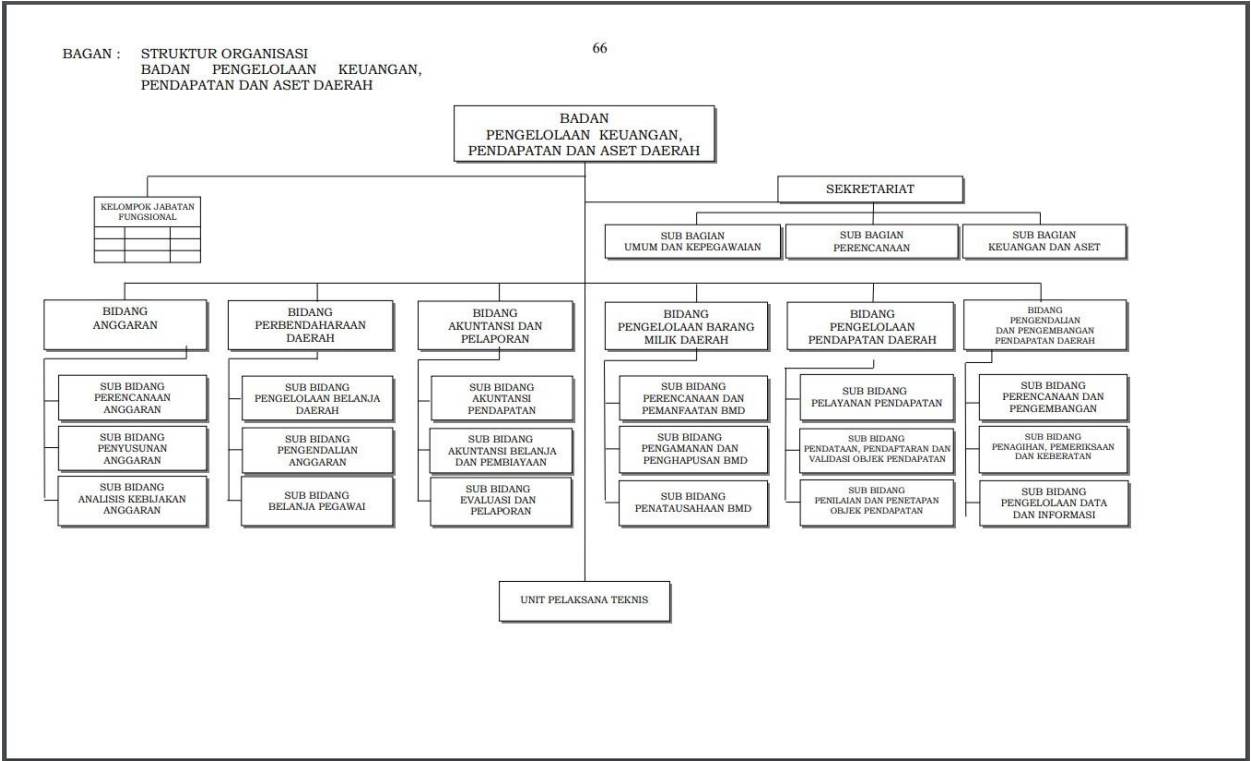
Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Pasal 27 ayat (1) terdiri dari:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- 3. Bidang Anggaran terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - c. Sub Bidang Analisis Kebijakan Anggaran.
- 4. Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
 - c. Sub Bidang Belanja Pegawai.
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- 7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Validasi Objek Pendapatan;
 - c. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan
- 8. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
- 9. UPTD
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi/jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar



Sumber Data : Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021

Uraian tugas pokok masing-masing unit organisasi pada BPKPAD Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 39 Tahun 2022 Uraian Tugas Badan Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang asset, bidang pengelolaan pendapatan, dan bidang pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai tugas :
- a. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. menyelenggarakan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah,

- pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Badan;
 - e. mengawasi dan mengendalikan bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah
 - g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit/perangkat kerja pemerintah daerah di bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan Aset daerah;
 - i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Badan;
 - j. merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan Aset daerah serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - k. membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan;
 - l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur organisasi Badan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Perbendaharaan Daerah;
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - g. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok JF.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan;
 - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan, dan;
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Uraian Tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. memantau pengelolaan anggaran dan Aset di lingkungan Badan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
 - c. menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Badan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Badan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Badan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

- a. menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana sarana kantor;
 - h. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 - i. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Badan serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Badan;
 - j. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 - k. membuat Daftar Urut Kependudukan (DUK), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti, absensi pegawai;
 - l. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Badan;
 - m. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Uraian Tugas Sub bagian Perencanaan sebagai berikut :
 - a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;

- c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Badan beserta dokumen penunjangnya;
 - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
 - f. menyusun profil pengelolaan keuangan, pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan masukan unit di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - h. menyusun laporan program dan kegiatan Badan secara berkala berdasarkan masukan unit di lingkungan Badan;
 - i. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan Aset daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset. Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai berikut :
 - a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan anggaran. Bidang Anggaran menyelenggarakan sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran;
 - c. pengoordinasian kegiatan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk Uraian Tugas Bidang Anggaran sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. mengoordinasikan kegiatan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. menyelenggarakan teknis urusan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan
- Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi mengenai perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. melaksanakan verifikasi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)/Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan (RBAP)/ Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - f. mendokumentasikan hasil kegiatan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - g. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- d. melaksanakan verifikasi dan pembahasan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)/Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- e. menyiapkan bahan Penyusunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan Perangkat Daerah/ instansi/bidang terkait penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan Perangkat Daerah / instansi/bidang terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. menyiapkan dan memfasilitasi terkait dengan penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- i. melaksanakan koordinasi terkait dengan persetujuan dan pengesahan Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- k. mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan anggaran; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Analisis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan instansi/bidang terkait dengan penyusunan regulasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyusunan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - f. mendokumentasikan hasil penyusunan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - g. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- 4. Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai. Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja dan program pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
 - c. pengoordinasian kegiatan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;

- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Perbendaharaan :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.
- Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi mengenai pengelolaan belanja daerah.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan belanja daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja daerah;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan belanja daerah;
 - d. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan instansi/bidang terkait dengan pengelolaan belanja daerah;
 - e. melaksanakan penatausahaan belanja daerah dan pemindahbukuan kas daerah;

- f. melaksanakan register Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja perangkat daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- h. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah;
- i. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- j. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan belanja daerah;
- l. mendokumentasikan hasil pengelolaan belanja daerah;
- m. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan belanja daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi mengenai pengendalian anggaran
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengendalian anggaran;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian anggaran;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian anggaran;
 - d. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan instansi/bidang terkait dengan pengendalian anggaran;
 - e. melaksanakan pengelolaan dana transfer dan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - f. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
 - g. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;

- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengendalian anggaran;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan pengendalian anggaran;
- j. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan pengendalian anggaran; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise mengenai belanja pegawai.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan belanja pegawai;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis belanja pegawai;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan belanja pegawai;
 - d. menyiapkan dan memfasilitasi kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan belanja pegawai;
 - e. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Gaji dan Non Gaji;
 - f. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 - g. melaporkan realisasi belanja gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait belanja pegawai;
 - i. mendokumentasikan hasil penyusunan belanja pegawai;
 - j. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan belanja pegawai; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan akuntansi dan pelaporan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja dan program akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan akuntansi

pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;

- c. pengoordinasian kegiatan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian Tugas Bidang Akuntansi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran dari akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.
- Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi akuntansi mengenai pendapatan.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan akuntansi pendapatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi pendapatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi pendapatan;

- d. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan instansi/bidang terkait dengan penyusunan akuntansi pendapatan;
 - e. menyusun tanggapan/tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - f. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyusunan akuntansi pendapatan;
 - h. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan akuntansi pendapatan;
 - i. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan akuntansi pendapatan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi mengenai akuntansi belanja dan pembiayaan.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan akuntansi belanja dan pendapatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - d. membina pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Kabupaten Banjar;
 - e. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan instansi/bidang terkait dengan penyusunan akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - f. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan dan beban;
 - g. mengoordinasikan, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
 - h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan akuntansi belanja dan pembiayaan;
 - i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan akuntansi belanja dan pembiayaan;

- j. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi mengenai evaluasi dan pelaporan.
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - e. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan instansi/bidang terkait dengan evaluasi dan pelaporan;
 - f. membina pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten;
 - g. mengoordinasikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - h. melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait evaluasi dan pelaporan;
 - j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
 - k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian pengaturan dan perumusan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah;
- c. pengoordinasian kegiatan urusan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian Tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah;
- c. mengoordinasikan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah;
- e. menyelenggarakan teknis urusan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan

- Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi mengenai perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah.

a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

d. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

e. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan instansi/bidang terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

f. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

g. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;

h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

j. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

- Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi mengenai pengamanan dan penghapusan barang milik daerah.

a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengamanan dan penghapusan barang milik daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengamanan dan penghapusan barang milik daerah;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan dan penghapusan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan dan memfasilitasi kerja sama dengan instansi/bidang terkait dengan pengamanan dan penghapusan barang milik daerah;
 - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengamanan dan penghapusan barang milik daerah;
 - j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pengamanan dan penghapusan barang milik daerah;
 - k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengamanan dan penghapusan barang milik daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
- Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penatausahaan barang milik daerah.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - d. melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah;
 - e. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;
 - f. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - g. menghimpun laporan persediaan barang milik daerah Perangkat Daerah;
 - h. menyusun penetapan pejabat yang mengelola barang milik daerah;

- i. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan penatausahaan barang milik daerah;
 - j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penatausahaan barang milik daerah;
 - k. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;
 - l. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengelolaan pendapatan daerah. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja dan program pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - c. pengoordinasian kegiatan urusan pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran dari pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan;

- c. mengoordinasikan kegiatan pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelayanan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan serta penilaian dan penetapan objek pendapatan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.
- Sub Bidang Pelayanan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitas dan supervisi mengenai pelayanan pendapatan.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pendapatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendapatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendapatan;
 - d. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan pelayanan pendapatan;
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan pendapatan;
 - f. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pelayanan pendapatan;
 - g. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pendapatan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Validasi Objek Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise mengenai pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan.

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - d. melaksanakan urusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), serta penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
 - e. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - g. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - h. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi mengenai penilaian dan penetapan objek pendapatan
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - d. mengoordinasikan perumusan rencana pendapatan daerah dan evaluasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - e. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penilaian dan penetapan objek pendapatan;
 - g. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan penilaian dan penetapan objek pendapatan;

- h. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penilaian dan penetapan objek pendapatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
8. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi;
 - c. pengoordinasian kegiatan urusan perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran dari perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi;
- c. mengoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi;

- e. menyelenggarakan teknis urusan perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi;
- f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan perencanaan dan pengembangan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pengelolaan data dan informasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. Kepala Badan.
- Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengembangan.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan;
 - d. menganalisis daftar wajib pajak serta kebijakan dan pengembangan pajak daerah;
 - e. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan pajak daerah dan pengelolaan;
 - f. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - g. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan perencanaan dan pengembangan;
 - h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perencanaan dan pengembangan;
 - i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
 - j. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penagihan, pemeriksaan dan keberatan.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data, pemantauan pajak dan inventarisasi data tunggakan wajib pajak;
 - e. melaksanakan analisis terkait laporan keberatan wajib pajak;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengkata pajak;
 - g. memberikan pertimbangan penetapan Keputusan pemberitahuan sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang kewajiban pajak;
 - h. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan data dan informasi.
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan data dan informasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana sitem informasi pajak daerah;
 - e. melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan evaluasi terhadap sistem informasi pajak daerah;
 - f. mengolah, memelihara dan melaporkan basis data pendapatan daerah;
 - g. menghimpun dan menyerahkan laporan secara periodik data objek dan subjek pemungutan pajak serta pengembangannya;
 - h. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan pengelolaan data dan informasi;
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan data dan informasi;
 - j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pengelolaan data dan informasi;

- k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan pada BPKPAD Kabupaten Banjar pada bulan Januari 2025 adalah 125 (Seratus Dua Puluh Empat) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang, tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 17 Orang dan tenaga kontrak sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) orang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan sebagaimana table 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPKPAD Kabupaten Banjar Per Januari 2025

Jenis Kelamin	PNS				PPPK		PTT	Jumlah	Pendidikan								Jumlah
	Gol				Gol												
	I	II	III	IV	V	IX			SD	SLTP	SLTA	D2	D3	D4	S1	S2	
L	-	2	25	6	1	7	26	67	-	3	14	-	-	-	47	6	70
P	-	2	23	4	0	9	20	58	-	2	2	-	2	-	41	8	55
Jumlah	-	4	47	10	1	16	46	125	-	5	16	-	2	-	88	14	125

Sumber Data : Sub Bagian Umpeg BPKPAD Kabupaten Banjar per Januari 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yaitu pegawai laki-laki berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang yang terdiri atas 36 (tiga puluh enam) orang PNS, 8 (delapan) orang PPPK dan 26 (dua puluh enam) orang tenaga kontrak. Untuk karyawan berjenis kelamin perempuan berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) orang PNS 9 (sembilan) orang PPPK dan 20 (dua puluh) orang tenaga kontrak. Jumlah tenaga kontrak sebanyak 46 (enam puluh) orang.

Sedangkan berdasarkan jenis pendidikan dapat diketahui bahwa pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas lulusan. Untuk SLTP sebanyak 5 (Orang) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Laki – Laki dan 2 (dua) Perempuan. Untuk pegawai lulusan SLTA berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri atas 14 (empat belas) orang laki-laki dan

2 (Dua) orang perempuan. Pegawai dengan ijazah D3 berjumlah 2 (Orang) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang perempuan. Lulusan sarjana strata-1 (S-1) berjumlah 88 (Delapan Puluh delapan) orang yang terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) orang laki-laki dan 41 (empat puluh satu) orang perempuan dan pegawai lulusan pasca sarjana berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang perempuan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar, serta guna menjamin terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang akuntabel. profesional dan berintegritas dan Kemandirian Fiskal. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan asset Daerah Kabupaten Banjar memandang perlu melakukan proyeksi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terencana, rasional, dan berkelanjutan.

Seiring meningkatnya beban kerja akibat dinamika pertumbuhan penduduk, pemanfaatan sistem digital, serta tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, kebutuhan ASN tidak hanya bertambah secara kuantitatif, tetapi juga menuntut peningkatan kualitas dan kompetensi.

Pada awal periode Renstra ini, jumlah ASN yang tersedia di BPKPAD Kabupaten Banjar belum sepenuhnya ideal. Berdasarkan analisis beban kerja dan proyeksi pelayanan lima tahun ke depan, kebutuhan ASN diproyeksikan akan meningkat, seperti yang disajikan pada table berikut :

Tabel 2. 2 Proyeksi Kebutuhan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah

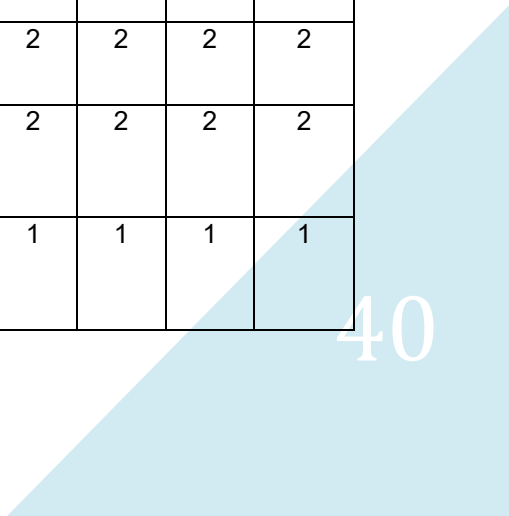
NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH BUZZETING 2025	JUMLAH KEBUTUHAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Proyeksi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				121	256	260	263	270	278
1	Kepala BPKPAD	JPTP	14	1	1	1	1	1	1
2	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	JF	12	0	1	1	1	1	1
3	JF Perencanaan Ahli Madya	JF	12	0	1	1	1	1	1
4	JF Analis Keuangan Pusat dan	JF	11	0	2	2	2	2	2

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH BUZZETING 2025	JUMLAH KEBUTUHAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Derah Ahli Madya								
5	Sekretaris	Administrator	12	1	1	1	1	1	1
6	JF Arsiparis Ahli Muda	JF	9	0	1	1	1	1	1
7	JF Perencanaan Ahli Muda	JF	10	0	1	1	1	1	1
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	0	1	1	1	1	1
9	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	JF	8	1	1	1	1	1	1
10	Arsiparis Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1
11	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1
12	Arsiparis Penyelia	JF	8	0	1	1	1	1	1
13	Arsiparis Mahir	JF	7	0	1	1	1	1	1
14	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	0	1	1	1	1	3
15	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	3	3	3	3	4	4
16	Arsiparis Terampil	JF	6	0	4	4	4	4	4
17	JF Pranata Komputer Terampil	JF	6	1	1	1	1	1	1
18	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	1	1	1	1	1
19	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana	6	0	1	1	1	1	1
20	Pengaministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	3	3	4	4	4	4
21	Pengelola Umum Operasional	Pelaksana	3	4	7	7	7	7	8
22	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
23	JF Perencana Ahli Pertama	JF	8	1	1	1	1	1	1

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH BUZZETING 2025	JUMLAH KEBUTUHAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
24	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	1	1	1	1	1	3
25	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	2	2	2	2	2	2
26	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	1	1	1	1	1
27	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	2	2	2	2	2	2
28	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
29	JF Penata Laksana Barang Mahir	JF	8	0	1	1	1	1	1
30	JF Penata Laksana Barang Terampil	JF	7	0	1	1	1	1	1
31	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	5	5	5	5	5	5
32	Penata Layanan Opearsional	Pelaksana	7	3	3	4	4	4	4
33	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	2	2	2	3	3	3
34	Pengolah data dan Informasi	Pelaksana	6	0	1	1	1	1	1
35	Kepala Bidang Anggaran	Administrator	11	1	1	1	1	1	1
36	JF Perencana Ahli Muda	JF	10	0	1	1	1	1	1
37	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	JF	9	0	1	1	1	1	1
38	JF Analis Hukum Ahli Muda	JF	9	0	1	1	1	1	1
39	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	JF	8	0	2	2	2	2	2
40	JF Analis Hukum Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH BUZZETING 2025	JUMLAH KEBUTUHAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
41	JF Perencana Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1
42	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
43	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	2	4	4	4	4	4
44	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	1	2	2	2	2	2
45	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	2	2	2	2	2
46	Sub Bidang Penyusun Anggaran	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
47	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	0	3	3	3	3	3
48	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	2	2	2	2	2	2
49	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	1	1	1	1	2
50	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	0	2	2	2	2	2
51	Sub Bidang Analisis Kebijakan Anggaran	Pengawas	9	0	1	1	1	1	1
52	Kepala Bidang Perbendaharaan	Administrator	11	1	1	1	1	1	1
53	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	JF	9	0	1	1	1	1	1
54	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1
55	Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
56	Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
57	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	2	2	2	2	2	2

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH BUZZETING 2025	JUMLAH KEBUTUHAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
58	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	4	4	4	4	4	4
59	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	2	2	2	2	2
60	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	1	1	1	1	1	1
61	Sub Bidang Belanja Pegawai	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
62	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	0	1	2	2	2	2
63	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	2	2	2	2	2	2
64	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	2	2	2	2	2
65	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	2	2	2	2	2	2
66	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Administrator	11	1	1	1	1	1	1
67	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	JF	9	0	1	1	1	1	1
68	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	JF	8	0	2	2	2	2	2
69	Sub Bidang Akuntansi Pendapatan	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
70	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	1	3	3	3	3	3
71	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	0	1	1	1	1	3
72	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	2	2	2	2	2
73	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	1	2	2	2	2	2
74	Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1



NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH BUZZETING 2025	JUMLAH KEBUTUHAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
75	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	1	4	4	4	4	4
76	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	2	3	3	3	3	3
77	Pengolah Data Data dan Infomasi	Pelaksana	6	0	2	2	2	3	3
78	Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
79	Kepala Bidang Pengelolaan Barang milik Daerah	Administrator	11	1	1	1	1	1	1
80	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	JF	9	0	1	1	1	1	1
81	JF Penata Laksana Barang Penyelia	JF	9	0	1	1	1	1	1
82	JF Analis keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1
83	JF Penata Laksana Barang Mahir	JF	8	0	9	9	9	9	9
84	JF Penata Laksana Barang Terampil	JF	7	0	14	14	14	14	14
85	Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan BMD	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
86	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	1	3	3	4	4	4
87	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	2	2	2	3	3
88	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	2	2	2	2	3	3
89	Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan BMD	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH BUZZETING 2025	JUMLAH KEBUTUHAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
90	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	1	3	3	4	4	4
91	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	2	2	2	2	2	2
92	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	4	4	4	4	4
93	JF Pranata Komputer Terampil	Fungsional	6	1	1	1	1	1	1
94	Sub Bidang Penatausahaa n BMD	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
95	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan	Administrator	11	1	1	1	1	1	1
96	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	JF	10	0	1	1	1	1	1
97	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	JF	9	0	1	1	1	1	1
98	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1
99	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1
100	Sub Bidang Pelayanan Pendapatan	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
101	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	1	3	3	3	3	3
102	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	8	8	8	8	8	8
103	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	1	1	1	2	2
104	Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Validasi Objek Pendapatan	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
105	Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH BUZZETING 2025	JUMLAH KEBUTUHAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
106	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	5	6	6	6	6	6
107	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	6	6	6	6	6	6
108	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	1	1	1	1	1
109	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	1	2	2	2	2	2
110	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan	Administrator	11	1	1	1	1	1	1
111	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	JF	10	0	1	1	1	1	1
112	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1
113	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	JF	8	0	1	1	1	1	1
114	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
115	Sub Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan	Pengawas	9	1	1	1	1	1	1
116	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	3	6	6	6	6	6
117	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	6	6	6	6	6	6
118	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	1	2	2	2	2	2
119	Juru Sita	Pelaksana	6	0	2	2	2	2	2
120	Penelaah Keberatan	Pelaksana	6	0	1	1	1	1	1
121	Pengelola layanan Operasional	Pelaksana	6	0	1	1	1	1	1
122	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	3	3	4	4	4	4

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH BUZZETING 2025	JUMLAH KEBUTUHAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
123	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	3	1	5	5	5	5	5
124	Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Pengawas	9	0	1	1	1	1	1
125	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	7	2	3	3	3	3	3
126	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	7	1	4	4	4	4	4
127	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	6	0	1	1	1	1	1
128	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	5	1	2	2	2	2	2
129	Operator Layanan Operasional		3	0	1	1	1	3	3

2.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKPAD Kabupaten Banjar dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan.

Sarana dan prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang terdiri dari sarana dan prasarana BPKPAD tersebut dapat dilihat pada

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
1	Sepeda Motor	HONDA / WIN	1994	Kurang Baik
2	Sepeda Motor	Honda / MCB Win	2002	Baik
3	Global Positioning System	-	2005	Rusak Berat
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki / APV	2006	Baik
5	Sepeda Motor	HONDA / Supra Fit NF 100 SL	2006	Baik
6	Sepeda Motor	Suzuki / Smash	2006	Baik
7	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	2006	Baik
8	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun FD125 XSD	2006	Baik
9	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	2006	Baik
10	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125	2006	Kurang Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
11	Global Positioning System	-	2006	Rusak Berat
12	Lemari Besi/Metal	-	2006	Rusak Berat
13	Lemari Kayu	-	2006	Rusak Berat
14	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2006	Rusak Berat
15	Lap Top	-	2006	Rusak Berat
16	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	2006	Rusak Berat
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2006	Baik
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2006	Baik
19	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	2006	Baik
20	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	2006	Baik
21	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-	2007	Rusak Berat
22	Mesin Ketik Listrik	-	2007	Rusak Berat
23	mesin ketik lainnya (dst)	-	2007	Rusak Berat
24	Lemari Kayu	-	2007	Rusak Berat
25	Papan Visual/Papan Nama	-	2007	Rusak Berat
26	Alat Penghancur Kertas	-	2007	Rusak Berat
27	Meja 1/2 Biro	-	2007	Rusak Berat
28	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2007	Rusak Berat
29	Kursi Putar	-	2007	Rusak Berat
30	Mesin Pemotong Rumput	-	2007	Rusak Berat
31	Lemari Es	Toshiba	2007	Kurang Baik
32	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Polytron	2007	Kurang Baik
33	Loudspeaker	Polytron	2007	Kurang Baik
34	Loudspeaker	-	2007	Kurang Baik
35	Gordyin/Kray	-	2007	Kurang Baik
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	2007	Rusak Berat
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2007	Rusak Berat
38	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2007	Rusak Berat
39	Camera Electronic	-	2007	Rusak Berat
40	Camera Film	-	2007	Rusak Berat
41	Layar Film/Projector	-	2007	Rusak Berat
42	Layar Film/Projector	-	2007	Kurang Baik
43	Telephone (PABX)	Panasonic	2007	Kurang Baik
44	Mainframe (Komputer Jaringan)	-	2007	Rusak Berat
45	Mainframe (Komputer Jaringan)	-	2007	Kurang Baik
46	Local Area Network (LAN)	-	2007	Rusak Berat
47	Local Area Network (LAN)	-	2007	Kurang Baik
48	Komputer Jaringan lainnya	-	2007	Rusak Berat
49	P.C Unit	-	2007	Kurang Baik
50	P.C Unit	-	2007	Rusak Berat
51	Note Book	-	2007	Rusak Berat
52	Monitor	Toshiba	2007	Kurang Baik
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 1700	2007	Kurang Baik
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ-2180	2007	Kurang Baik
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	HP	2007	Kurang Baik
56	Wireless Access Point	-	2007	Kurang Baik
57	Buku Umum Lain-lain	-	2007	Kurang Baik
58	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Nissan / Livina 1,5 4x2 M/T	2008	Baik
59	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	2008	Baik
60	Sepeda Motor	Suzuki Shogun / FL 125 RCD	2008	Baik
61	Sepeda Motor	Suzuki Shogun / FL 125RCD	2008	Baik
62	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-	2008	Rusak Berat
63	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-	2008	Rusak Berat
64	Mesin Penghitung Uang	-	2008	Kurang Baik
65	Lemari Kayu	-	2008	Rusak Berat
66	Papan Visual/Papan Nama	-	2008	Rusak Berat
67	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2008	Rusak Berat

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
68	Kursi Rapat	-	2008	Rusak Berat
69	Kursi Putar	-	2008	Kurang Baik
70	Meubeleur lainnya	-	2008	Rusak Berat
71	Lemari Es	Toshiba	2008	Kurang Baik
72	A.C. Split	Panasonic	2008	Kurang Baik
73	A.C. Split	Toshiba	2008	Kurang Baik
74	A.C. Split	Mitsubishi	2008	Kurang Baik
75	Alat Hiasan	-	2008	Rusak Berat
76	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2008	Rusak Berat
77	Layar Film/Projector	Toshiba	2008	Baik
78	Komputer Jaringan lainnya	-	2008	Rusak Berat
79	P.C Unit	-	2008	Kurang Baik
80	P.C Unit	-	2008	Rusak Berat
81	Note Book	-	2008	Rusak Berat
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2008	Rusak Berat
83	Jaringan Transmisi Lain-lain	-	2008	Rusak Berat
84	Transportable Generating Set	Starke GFS40 / -	2009	Kurang Baik
85	Portable Generating Set	-	2009	Baik
86	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	2009	Baik
87	Sepeda Motor	Suzuki Shogun / Shogun 125	2009	Baik
88	Filing Cabinet Besi	-	2009	Baik
89	Papan Visual/Papan Nama	-	2009	Baik
90	Kursi Kayu	-	2009	Baik
91	Kursi Rapat	Rakuda	2009	Baik
92	A.C. Split	-	2009	Baik
93	Televisi	-	2009	Kurang Baik
94	Camera Video	Samsung	2009	Kurang Baik
95	Handy Cam	Samsung	2009	Baik
96	Gordyin/Kray	-	2009	Kurang Baik
97	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2009	Kurang Baik
98	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2009	Baik
99	Local Area Network (LAN)	-	2009	Baik
100	Komputer Jaringan lainnya	-	2009	Rusak Berat
101	P.C Unit	-	2009	Baik
102	Lap Top	Sony / PCG 61112 L	2009	Kurang Baik
103	Lap Top	Acer / Aspire 4732Z	2009	Kurang Baik
104	Lap Top	Sony / VAIO	2009	Kurang Baik
105	Lap Top	Pico	2009	Kurang Baik
106	Lap Top	Axio	2009	Kurang Baik
107	Lap Top	Toshiba / Portage M880	2009	Kurang Baik
108	Lap Top	-	2009	Kurang Baik
109	Note Book	-	2009	Rusak Berat
110	Ensynclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	2009	Kurang Baik
111	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki / APV STD	2010	Baik
112	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	2010	Baik
113	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	2010	Baik
114	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	2010	Baik
115	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun FL 125 SD	2010	Baik
116	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	2010	Baik
117	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun FL125FD	2010	Baik
118	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun FL125FD	2010	Baik
119	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	-	2010	Baik
120	Brandkas	-	2010	Baik
121	Papan Visual/Papan Nama	-	2010	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
122	Sofa	Pro Design	2010	Baik
123	Lemari Es	-	2010	Baik
124	A.C. Split	-	2010	Baik
125	Televisi	Samsung / 32 inch	2010	Baik
126	Camera Video	CANON	2010	Kurang Baik
127	Handy Cam	JVC 4 GB	2010	Baik
128	Gordyin/Kray	-	2010	Baik
129	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	Baik
130	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	Kurang Baik
131	Mainframe (Komputer Jaringan)	-	2010	Baik
132	Local Area Network (LAN)	-	2010	Baik
133	P.C Unit	-	2010	Baik
134	Lap Top	-	2010	Kurang Baik
135	Lap Top	Lenovo	2010	Baik
136	Lap Top	-	2010	Kurang Baik
137	Monitor	-	2010	Kurang Baik
138	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2010	Baik
139	Ensynclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	2010	Baik
140	Ensynclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	2010	Kurang Baik
141	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Innova	2011	Baik
142	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Avanza 1500 S	2011	Baik
143	Sepeda Motor	Suzuki / Titan FW 110 SD	2011	Baik
144	Sepeda Motor	Suzuki / Titan FW 110 SD	2011	Baik
145	Sepeda Motor	Suzuki / Titan FW110SCD	2011	Baik
146	Sepeda Motor	Suzuki / Titan FW110SCD	2011	Baik
147	Sepeda Motor	Suzuki / Titan FW110SCD	2011	Baik
148	Sepeda Motor	Suzuki / Titan FW110SCD	2011	Baik
149	Global Positioning System	Garmin / GPS Map 62s	2011	Baik
150	Mesin Penghitung Uang	Dynamic / 993 EV	2011	Baik
151	Lemari Kayu	-	2011	Baik
152	Lemari Kayu	-	2011	Baik
153	Lemari Kayu	Sedang	2011	Baik
154	Filing Cabinet Besi	Brother	2011	Baik
155	Filing Cabinet Besi	Acer Aspire / Core I3 M3920	2011	Baik
156	White Board	-	2011	Baik
157	White Board	-	2011	Baik
158	Alat Penghancur Kertas	Gemet / 320 C	2011	Kurang Baik
159	Alat Penghancur Kertas	Cross Master	2011	Baik
160	Meja 1/2 Biro	Pro Design	2011	Kurang Baik
161	Kursi Tamu	Jati	2011	Baik
162	Kursi Putar	Rakuda	2011	Kurang Baik
163	Kursi Lipat	Prontline	2011	Baik
164	Meubeleur lainnya	Emma	2011	Baik
165	Lemari Es	LG / GN-V212 RLT	2011	Baik
166	A.C. Split	Polytron / SN 77A159	2011	Baik
167	A.C. Split	Toshiba / RAS-18SKPX-ID	2011	Baik
168	A.C. Split	LG / S-18	2011	Baik
169	A.C. Split	LG	2011	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
170	Exhause Fan	Panasonic / FV 30 RUN 3	2011	Baik
171	Exhause Fan	-	2011	Kurang Baik
172	Televisi	Sharp / LC32L400M	2011	Baik
173	Televisi	Sharp 32 / LC32L400M	2011	Baik
174	Televisi	LG	2011	Baik
175	Camera Video	Nikon / D 7000	2011	Baik
176	Camera Video	Samsung	2011	Kurang Baik
177	Camera Video	Fuji	2011	Baik
178	Camera Video	Sony / DSCW 320	2011	Baik
179	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Martin	2011	Baik
180	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pro Design	2011	Baik
181	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Pro Design	2011	Baik
182	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2011	Baik
183	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baby KU	2011	Baik
184	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Rakuda	2011	Baik
185	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2011	Baik
186	Facsimile	Panasonic / T-983	2011	Baik
187	P.C Unit	Intel Dual Core	2011	Baik
188	P.C Unit	Dell Inspiron / 620 MT	2011	Baik
189	P.C Unit	Dell Inspiron / 620 MT	2011	Baik
190	P.C Unit	Asus / A42F-VX 085D	2011	Baik
191	Lap Top	Toshiba / L 735	2011	Baik
192	Lap Top	Toshiba Satellite / L 645	2011	Baik
193	Lap Top	Toshiba / L645	2011	Kurang Baik
194	Lap Top	Toshiba / NB 305	2011	Baik
195	Lap Top	Acer Ashpire / 4738 Z	2011	Baik
196	Lap Top	ICA	2011	Baik
197	Personal Komputer lainnya	IPAD 2 / 3G 16 GB	2011	Baik
198	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP 258	2011	Baik
199	Server	IBM / Server X3550-7994-A2A	2011	Baik
200	Peralatan Jaringan lainnya	TP Link	2011	Baik
201	Peralatan Jaringan lainnya	-	2011	Baik
202	Peralatan Jaringan lainnya	-	2011	Baik
203	Peralatan Jaringan lainnya	-	2011	Baik
204	Peralatan Jaringan lainnya	TP Link / TL-WA 701 ND	2011	Baik
205	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Avanza G	2012	Baik
206	Pick Up	Toyota / Hilux 2.5e Double Cabin	2012	Baik
207	Mesin Gergaji	Chainshaw	2012	Baik
208	Global Positioning System	Garmin / MAP 625	2012	Baik
209	Filing Cabinet Besi	Brother	2012	Baik
210	Filing Cabinet Besi	-	2012	Baik
211	Brandkas	EGMA / 800 Manual	2012	Baik
212	Lemari Kaca	-	2012	Baik
213	Alat Penghancur Kertas	JP / 610C	2012	Baik
214	Meja 1/2 Biro	Pro Design	2012	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
215	A.C. Split	Akari / 095 FLW	2012	Baik
216	Camera Video	-	2012	Baik
217	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pro Design	2012	Baik
218	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pro Design	2012	Baik
219	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Pro Design	2012	Baik
220	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Ushinto	2012	Baik
221	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Rakuda	2012	Baik
222	P.C Unit	HP Compaq / Presario CQ3622D	2012	Baik
223	P.C Unit	-	2012	Baik
224	P.C Unit	HP Compaq Presario / CQ3622D	2012	Baik
225	P.C Unit	HP Compaq Presario / CQ 3622 D	2012	Baik
226	P.C Unit	HP Omni / 120 1210i	2012	Baik
227	Lap Top	-	2012	Baik
228	Lap Top	BYON	2012	Baik
229	Lap Top	Sony Vaio	2012	Baik
230	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2012	Baik
231	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MCF-J6710 DW	2012	Baik
232	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laser	2012	Baik
233	Ensynclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	2012	Baik
234	Buku Umum Lain-lain	-	2012	Baik
235	Ekonomi	-	2012	Baik
236	Portable Generating Set	Outdoor use only	2013	Baik
237	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Innova G M/T Luxury	2013	Baik
238	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki / Ertiga GL M/T	2013	Baik
239	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki / Ertiga GL M/T	2013	Baik
240	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki / Ertiga GL M/T	2013	Baik
241	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki / Ertiga GL M/T	2013	Baik
242	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki / Ertiga GL M/T	2013	Baik
243	Sepeda Motor	Honda / NF12A1CF M/T	2013	Baik
244	Scooter	Yamaha / X-ride	2013	Baik
245	Scooter	Yamaha / X-ride	2013	Baik
246	Scooter	Yamaha / X-ride	2013	Baik
247	Scooter	Yamaha / X-ride	2013	Baik
248	Scooter	Yamaha / X-ride	2013	Baik
249	Scooter	Yamaha / X-ride	2013	Baik
250	Scooter	Yamaha / X-ride	2013	Baik
251	Rol Meter	-	2013	Baik
252	Global Positioning System	Garmin GPS Montana / 650 Standard Accessories	2013	Baik
253	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Brother	2013	Baik
254	Mesin Penghitung Uang	Newmark / NM-03C	2013	Baik
255	Lemari Besi/Metal	Brother	2013	Baik
256	Lemari Besi/Metal	Brother	2013	Baik
257	Lemari Kayu	-	2013	Baik
258	Lemari Kayu	-	2013	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
259	Lemari Kayu	-	2013	Baik
260	Lemari Kayu	-	2013	Baik
261	Rak Kayu	-	2013	Baik
262	Filing Cabinet Besi	Brother	2013	Baik
263	CCTV - Camera Control Television System	-	2013	Baik
264	Alat Penghancur Kertas	-	2013	Baik
265	Alat Penghancur Kertas	Klaz / AF-75	2013	Baik
266	Alat Penghancur Kertas	Klazz / Af-60	2013	Kurang Baik
267	Alat Penghancur Kertas	Klazz / Af-60	2013	Baik
268	Perforator Besar	-	2013	Baik
269	Alat Kantor Lainnya	-	2013	Baik
270	Alat Kantor Lainnya	-	2013	Baik
271	Alat Kantor Lainnya	-	2013	Baik
272	Alat Kantor Lainnya	-	2013	Baik
273	Kursi Rapat	Chitose Cavis	2013	Baik
274	Kursi Lipat	Tiger	2013	Baik
275	Meja Komputer	-	2013	Baik
276	Sofa	-	2013	Baik
277	Meubeleur lainnya	-	2013	Baik
278	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	2013	Baik
279	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	2013	Baik
280	Lemari Es	Toshiba / GR-N9P	2013	Baik
281	Lemari Es	Toshiba / GR-N188JZ	2013	Baik
282	Lemari Es	Sanyo	2013	Baik
283	Lemari Es	Sharp	2013	Baik
284	Lemari Es	-	2013	Baik
285	A.C. Split	LG / SN12LFG	2013	Baik
286	A.C. Split	Sharp / AHA 12 PEY	2013	Baik
287	A.C. Split	-	2013	Baik
288	A.C. Split	Sharp / AH-A9MEY	2013	Baik
289	A.C. Split	Sharp / AH-A18NCY	2013	Baik
290	A.C. Split	Daikin	2013	Baik
291	Alat Dapur lainnya	-	2013	Baik
292	Televisi	LG / 22LN4000	2013	Baik
293	Televisi	Samsung / LA32E420E2M	2013	Baik
294	Televisi	Toshiba / LED	2013	Baik
295	Sound System	Monitor russel / KB-100	2013	Baik
296	Unit Power Supply	ICA / 1200 VA	2013	Baik
297	Unit Power Supply	APC / SUA3000RMXLi3 U	2013	Baik
298	Unit Power Supply	APC UPS / BX1100CI	2013	Baik
299	Unit Power Supply	-	2013	Baik
300	Camera Video	Nikon / 3100	2013	Baik
301	Camera Video	-	2013	Baik
302	Dispenser	Polytron	2013	Baik
303	Dispenser	Polytron	2013	Kurang Baik
304	Handy Cam	Sony	2013	Baik
305	Handy Cam	-	2013	Baik
306	Karpet	-	2013	Baik
307	Gordyin/Kray	-	2013	Baik
308	Gordyin/Kray	-	2013	Baik
309	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2013	Baik
310	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2013	Baik
311	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2013	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
312	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2013	Baik
313	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2013	Baik
314	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2013	Baik
315	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2013	Baik
316	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	2013	Baik
317	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2013	Baik
318	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Indachi / D-800	2013	Baik
319	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2013	Baik
320	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2013	Baik
321	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2013	Baik
322	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Barcelona / ktm.009	2013	Baik
323	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Barcelona / ktm.006	2013	Baik
324	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2013	Baik
325	Buffet Kayu	-	2013	Baik
326	peralatan studio audio lainnya (dst)	-	2013	Baik
327	Layar Film/Projector	-	2013	Baik
328	Layar Film/Projector	Infocus / 126	2013	Baik
329	Facsimile	Panasonic / KX-FP206CX	2013	Baik
330	Mainframe (Komputer Jaringan)	IBM System / x3650M4-C2A	2013	Baik
331	Mainframe (Komputer Jaringan)	IBM System / X3250 M Rackmount	2013	Baik
332	Local Area Network (LAN)	-	2013	Baik
333	P.C Unit	Acer / MC 605	2013	Baik
334	P.C Unit	Acer Ashpire / MC 605	2013	Baik
335	P.C Unit	HP Pavilion / P2-1452 PL	2013	Baik
336	P.C Unit	HP / Pavilion 23-b020L All in One PC	2013	Baik
337	P.C Unit	-	2013	Baik
338	P.C Unit	HP Pavilion / 281 D	2013	Baik
339	P.C Unit	Acer Aspire X / 1935	2013	Baik
340	P.C Unit	HP	2013	Baik
341	P.C Unit	Dazumba / Core i3	2013	Baik
342	Lap Top	Samsung Ativ / Book 9 Lite	2013	Baik
343	Lap Top	HP Pavillion / G4-2133 TX	2013	Baik
344	Lap Top	HP Pavilion / G4-2205 TX	2013	Baik
345	Lap Top	Sony Vaio / Duo 11	2013	Baik
346	Lap Top	Toshiba / Satellite c840	2013	Baik
347	Lap Top	Sony Vaio	2013	Baik
348	Lap Top	Samsung / NP530U4E-K01ID	2013	Baik
349	Lap Top	Samsung / NP270E4V-K02ID	2013	Baik
350	Lap Top	Sony Vaio / SV-F14212SG	2013	Baik
351	Lap Top	Toshiba / Satelite L840-1045X	2013	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
352	Lap Top	Toshiba	2013	Baik
353	Lap Top	Sony / VAIO	2013	Baik
354	Lap Top	-	2013	Baik
355	Personal Komputer lainnya	Samsung Galaxy / Note 8	2013	Baik
356	peralatan mainframe lainnya (dst)	-	2013	Baik
357	Monitor	Dell TM / E Series E1713S	2013	Baik
358	Monitor	Philips / 18'5	2013	Baik
359	Monitor	LG / 18'5	2013	Baik
360	Monitor	-	2013	Baik
361	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFC-J5910DW	2013	Baik
362	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Line Matrix Printer Printonix / P7215	2013	Baik
363	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2013	Baik
364	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma E510	2013	Baik
365	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP237	2013	Baik
366	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ2190	2013	Baik
367	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet	2013	Baik
368	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFC-6910DW	2013	Baik
369	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFC-J6710DW	2013	Baik
370	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2013	Baik
371	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP 237	2013	Baik
372	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laser All in One	2013	Baik
373	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Canon LIDE	2013	Baik
374	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2013	Baik
375	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iPF765 5 color/A0	2013	Baik
376	External	-	2013	Baik
377	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	2013	Baik
378	Server	IBM / X3650 M4	2013	Kurang Baik
379	Peralatan Jaringan lainnya	-	2013	Baik
380	Peralatan Jaringan lainnya	Peralatan Simda	2013	Baik
381	Peralatan Jaringan lainnya	-	2013	Baik
382	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	2013	Baik
383	Buku Umum Lain-lain	-	2013	Baik
384	Ekonomi	-	2013	Baik
385	Hukum	-	2013	Baik
386	Pick Up	Toyota / Hilux Double Cabin	2014	Baik
387	Pick Up	Toyota / Hilux 2,5GDC(4X4) M/T	2014	Baik
388	Sepeda Motor	Honda / Revo	2014	Baik
389	Sepeda Motor	Honda / Revo	2014	Baik
390	Sepeda Motor	Honda / Revo	2014	Baik
391	Sepeda Motor	Honda / Revo	2014	Baik
392	Sepeda Motor	Honda / Revo	2014	Baik
393	Scooter	Honda / Beat CW CBS FI/PGM FI	2014	Baik
394	Scooter	Honda / Beat CW CBS FI/PGM FI	2014	Baik
395	Scooter	Honda / Beat CW CBS FI/PGM FI	2014	Baik
396	Scooter	Honda / Beat CW CBS FI/PGM FI	2014	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
397	Scooter	Honda / Beat CW CBS FI/PGM FI	2014	Baik
398	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	Bosch Rangefinder 40	2014	Baik
399	Global Positioning System	Garmin / Montera Glonass	2014	Baik
400	Global Positioning System	Garmin Monterra	2014	Baik
401	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Casio / DJ-120 D	2014	Baik
402	Mesin Penghitung Uang	Dynamic	2014	Baik
403	Lemari Besi/Metal	Informa	2014	Baik
404	Lemari Besi/Metal	Lion	2014	Baik
405	Lemari Besi/Metal	Informa	2014	Baik
406	Brandkas	Uchida	2014	Baik
407	CCTV - Camera Control Television System	-	2014	Baik
408	Papan Visual/Papan Nama	-	2014	Baik
409	Alat Penghancur Kertas	Daichiban / DX-07	2014	Baik
410	Alat Penghancur Kertas	ZSA / 1200 DC	2014	Baik
411	Alat Penghancur Kertas	Origin	2014	Baik
412	Alat Penghancur Kertas	-	2014	Baik
413	Mesin Laminating	LPF-Lamipacker / 330 WH	2014	Baik
414	Kursi Besi/Metal	-	2014	Baik
415	Kursi Besi/Metal	-	2014	Baik
416	Meja Rapat	High Point OD 032	2014	Baik
417	Kursi Putar	-	2014	Baik
418	Kursi Biasa	Active Kent / KS 101	2014	Baik
419	Kursi Biasa	Front Line / KSPB FL 103	2014	Baik
420	Sofa	-	2014	Baik
421	Sofa	Import 3.1.1	2014	Baik
422	Jam Mekanis	Quartz	2014	Baik
423	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Picolo	2014	Baik
424	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	2014	Baik
425	Lemari Es	Toshiba / N199 GHI	2014	Baik
426	Lemari Es	Toshiba / Glacio	2014	Baik
427	Lemari Es	Panasonic	2014	Baik
428	A.C. Sentral	Panasonic	2014	Baik
429	A.C. Split	LG	2014	Baik
430	Rice Warmer	-	2014	Baik
431	Televisi	LG	2014	Baik
432	Televisi	-	2014	Baik
433	Televisi	LG / PN 4500	2014	Baik
434	Televisi	LED FULL HD, USB Port, HDMI,	2014	Baik
435	Sound System	Peavey	2014	Baik
436	Mic Conference	SoundBest / SB-888	2014	Baik
437	Unit Power Supply	ICA / CT 1382B	2014	Baik
438	Unit Power Supply	ICA / CE 1200	2014	Baik
439	Unit Power Supply	ICA / UPS Line Interactive	2014	Baik
440	Unit Power Supply	APC / Back-UPS 1100 VA/660W	2014	Baik
441	Unit Power Supply	ICA / CE 1200	2014	Baik
442	Unit Power Supply	ICA / SIN 2100C	2014	Baik
443	Unit Power Supply	ICA	2014	Baik
444	Camera Video	-	2014	Baik
445	Dispenser	Sanken / 730	2014	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
446	Dispenser	Sharp / SWD-77EH-BK	2014	Baik
447	Tangga Hidrolik	-	2014	Baik
448	Handy Cam	-	2014	Baik
449	Karpet	Dalton	2014	Baik
450	Gordyin/Kray	-	2014	Baik
451	Gordyin/Kray	Sharp / Point	2014	Baik
452	Gordyin/Kray	Vertical Blind	2014	Baik
453	Gordyin/Kray	Vertical Blind	2014	Baik
454	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2014	Baik
455	Alat Pemadam/Portable	-	2014	Baik
456	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2014	Baik
457	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Zetta / MT 301	2014	Baik
458	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Zetta / MT 201 S	2014	Baik
459	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	KD-102 Oscar Hitam	2014	Baik
460	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2014	Baik
461	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	KD / 103 CTL	2014	Baik
462	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Indachi / D-800	2014	Baik
463	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Activ	2014	Baik
464	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Custom	2014	Baik
465	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2014	Baik
466	Microphone/Boom Stand	SS 503	2014	Baik
467	peralatan studio audio lainnya (dst)	-	2014	Baik
468	peralatan studio audio lainnya (dst)	-	2014	Baik
469	Layar Film/Projector	Panasonic / PT-LB300	2014	Baik
470	Layar Film/Projector	Panasonic / PT L330	2014	Baik
471	Pesawat Telephone	Panasonic / KX-T7730X	2014	Baik
472	Facsimile	Panasonic / KX-FT983	2014	Baik
473	Facsimile	Panasonic	2014	Baik
474	Facsimile	Panasonic / KX-FP701CX	2014	Baik
475	P.C Unit	Lenovo / C460 dan Windows 7 (Original)	2014	Baik
476	P.C Unit	HP / Pavilion 20	2014	Baik
477	P.C Unit	-	2014	Baik
478	P.C Unit	Lenovo	2014	Baik
479	Lap Top	Toshiba / L 40	2014	Baik
480	Lap Top	Asus / X 200	2014	Baik
481	Lap Top	Sony Vaio fit	2014	Baik
482	Lap Top	Fujitsu / UH 554	2014	Baik
483	Lap Top	-	2014	Baik
484	Lap Top	Toshiba	2014	Baik
485	Lap Top	Toshiba / Satellite C40 A108 Plus Win 7 Pro	2014	Baik
486	Note Book	Acer / P3 i3 171 Ultrabook	2014	Baik
487	Note Book	Acer / P3 i3 171 Ultrabook	2014	Baik
488	Note Book	Acer / P3 i3 171 Ultrabook	2014	Baik
489	Note Book	Acer / P3 i3 171 Ultrabook	2014	Baik
490	Note Book	Acer / P3 i3 171 Ultrabook	2014	Baik
491	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2014	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
492	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MX 397	2014	Baik
493	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L350 Multifungsi	2014	Baik
494	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson A4 / Inkjet	2014	Baik
495	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fuji Xerox / All in One Laser	2014	Baik
496	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MX477	2014	Baik
497	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MX397	2014	Baik
498	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MX397	2014	Baik
499	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFP J320	2014	Baik
500	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MX 397	2014	Baik
501	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printronix / P7215	2014	Baik
502	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma / E400	2014	Baik
503	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	2014	Baik
504	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printonik / P7215	2014	Baik
505	External	Seagate	2014	Baik
506	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	2014	Kurang Baik
507	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	2014	Baik
508	Server	HP	2014	Baik
509	Peralatan Jaringan lainnya	-	2014	Baik
510	Peralatan Jaringan lainnya	-	2014	Baik
511	Peralatan Jaringan lainnya	-	2014	Baik
512	Peralatan Jaringan lainnya	-	2014	Baik
513	Alat Volley	-	2014	Baik
514	Catur	-	2014	Baik
515	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	-	2014	Baik
516	Ensynclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	2014	Baik
517	Buku Umum Lain-lain	-	2014	Baik
518	Ekonomi	-	2014	Baik
519	Hukum	-	2014	Baik
520	Hukum	-	2014	Baik
521	Portable Generating Set	-	2015	Baik
522	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Nissan / Evalia	2015	Baik
523	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Nissan / Evalia 1.5 (4x2) M/T	2015	Baik
524	Scooter	Yamaha / 1 LB	2015	Baik
525	Scooter	Yamaha / 1 LB	2015	Baik
526	Scooter	Yamaha / 1 LB	2015	Baik
527	Scooter	Yamaha / 1 LB	2015	Baik
528	Scooter	Yamaha / 1 LB	2015	Baik
529	Scooter	Yamaha / 1 LB	2015	Baik
530	Mesin Hitung Manual	Telstruk	2015	Baik
531	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Casio / PJ 120 D	2015	Baik
532	Lemari Besi/Metal	-	2015	Baik
533	Lemari Kayu	-	2015	Baik
534	Brandkas	Champion	2015	Baik
535	Brandkas	Chubb	2015	Baik
536	Papan Visual/Papan Nama	-	2015	Baik
537	Papan Nama Instansi	-	2015	Baik
538	Papan Nama Instansi	-	2015	Baik
539	Papan Nama Instansi	-	2015	Baik
540	Alat Kantor Lainnya	-	2015	Baik
541	Kursi Besi/Metal	Frontline	2015	Baik
542	Meja Rapat	-	2015	Baik
543	Meja Rapat	-	2015	Baik
544	Meja Resepsionis	-	2015	Baik
545	Kasur/Spring Bed	Central	2015	Baik
546	Kursi Rapat	Informa	2015	Baik
547	Kursi Putar	-	2015	Baik
548	Kursi Lipat	Phonix	2015	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
549	Sofa	Domian / 22111	2015	Baik
550	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	2015	Baik
551	Lemari Es	Toshiba	2015	Baik
552	Lemari Es	Samsung / RT-32 Farcosa	2015	Baik
553	A.C. Split	Panasonic	2015	Baik
554	A.C. Split	Sharp	2015	Baik
555	A.C. Split	LG / 9 NL	2015	Baik
556	A.C. Split	Panasonic	2015	Baik
557	Alat Pendingin lainnya	Honeywell	2015	Baik
558	Televisi	LG	2015	Baik
559	Televisi	LG / Plasma	2015	Baik
560	Televisi	LG / Plasma	2015	Baik
561	Sound System	Yamaha	2015	Baik
562	Wireless	SoundBest / SB-878	2015	Baik
563	Unit Power Supply	ICA / CT 682 B	2015	Baik
564	Unit Power Supply	ICA / CT 1682 B	2015	Baik
565	Unit Power Supply	ICA / CT 1082 B	2015	Baik
566	Camera Video	Canon / EOS 1200D	2015	Baik
567	Camera Video	Nikon / D3200	2015	Baik
568	Camera Video	Sony	2015	Baik
569	Tangga Aluminium	Kemko / Multifungsi 3 M	2015	Baik
570	Dispenser	-	2015	Baik
571	Karpet	Milano	2015	Baik
572	Karpet	-	2015	Baik
573	Gordyin/Kray	Vertikal Blind	2015	Baik
574	Alat Pemadam/Portable	Gunbo / Ultima	2015	Baik
575	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Informa	2015	Baik
576	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Informa	2015	Baik
577	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Informa	2015	Baik
578	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2015	Baik
579	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Topan / MTM.02/01 B	2015	Baik
580	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Custom	2015	Baik
581	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Informa	2015	Baik
582	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Informa	2015	Baik
583	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Informa	2015	Baik
584	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2015	Baik
585	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	Informa	2015	Baik
586	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	-	2015	Baik
587	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	-	2015	Baik
588	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	-	2015	Baik
589	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Custom	2015	Baik
590	Buffet Kayu	Custom	2015	Baik
591	Lensa Kamera	-	2015	Baik
592	Layar Film/Projector	-	2015	Baik
593	Layar Film/Projector	Sony	2015	Baik
594	P.C Unit	Lenovo	2015	Baik
595	P.C Unit	HP / 20-221 d	2015	Baik
596	P.C Unit	HP Pavilion / All In One	2015	Baik
597	Lap Top	Asus / x450JB	2015	Baik
598	Lap Top	Asus / X550JX	2015	Baik
599	Lap Top	Lenovo / Think Pad E440	2015	Baik
600	Lap Top	Lenovo / Think Pad E440	2015	Baik
601	Lap Top	Lenovo / Think Pad E440	2015	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
602	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma E400	2015	Baik
603	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Laserjet / LBP6680X	2015	Baik
604	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Dot Matrik LQ-2190	2015	Baik
605	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2015	Baik
606	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MX 477	2015	Baik
607	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFC-J5910DW	2015	Baik
608	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printronix / P8210	2015	Baik
609	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet / Pro M225dn	2015	Baik
610	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	2015	Baik
611	Server	IBM / System X3500	2015	Baik
612	Server	IBM / Lenovo	2015	Baik
613	Peralatan Jaringan lainnya	-	2015	Baik
614	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	-	2015	Baik
615	Ensynclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	2015	Baik
616	Buku Umum Lain-lain	-	2015	Baik
617	Hukum	-	2015	Baik
618	Hukum	-	2015	Baik
619	Mesin Ketik Listrik	Brother / GX-6750	2016	Baik
620	Lemari Kayu	-	2016	Baik
621	Lemari Kayu	Custom	2016	Baik
622	Lemari Kayu	Custom	2016	Baik
623	Rak Besi	Lion	2016	Baik
624	Filing Cabinet Besi	Brother	2016	Baik
625	Filing Cabinet Besi	Informa	2016	Baik
626	CCTV - Camera Control Television System	Indotech	2016	Baik
627	CCTV - Camera Control Television System	-	2016	Baik
628	Alat Detektor Uang Palsu	Krisbow	2016	Baik
629	Alat Penghancur Kertas	Kozur / JP-812C SHREDDER	2016	Baik
630	Mesin Absensi	Finger Spot Revo / FF-157 NB	2016	Baik
631	Mesin Absensi	-	2016	Baik
632	Meja Kerja Kayu	-	2016	Baik
633	Kursi Besi/Metal	-	2016	Baik
634	Meja Rapat	Informa	2016	Baik
635	Kursi Rapat	Front Line	2016	Baik
636	Kursi Biasa	Ushintoto	2016	Baik
637	Kursi Lipat	Chitose NN	2016	Baik
638	Meja Komputer	-	2016	Baik
639	Meubeleur lainnya	Custom	2016	Baik
640	Lemari Es	Samsung	2016	Baik
641	A.C. Split	LG	2016	Baik
642	A.C. Split	Sharp / AH-AP5SHL	2016	Baik
643	A.C. Split	Sharp / AH-AP9SHL	2016	Baik
644	A.C. Split	Sharp / AH-A18SEY	2016	Baik
645	A.C. Split	Sharp	2016	Baik
646	Exhaust Fan	-	2016	Baik
647	Exhaust Fan	-	2016	Baik
648	Alat Pendingin lainnya	Krisbow	2016	Baik
649	Televisi	Samsung	2016	Baik
650	Televisi	Samsung	2016	Baik
651	Televisi	Samsung	2016	Baik
652	Televisi	LG / LB530	2016	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
653	Sound System	Yamaha	2016	Baik
654	Unit Power Supply	ICA / CT 682 B	2016	Baik
655	Unit Power Supply	-	2016	Baik
656	Unit Power Supply	APC SURT / 10000 XLI	2016	Baik
657	Unit Power Supply	-	2016	Baik
658	Dispenser	Sharp	2016	Baik
659	Karpet	-	2016	Baik
660	Karpet	Milano	2016	Baik
661	Gordyin/Kray	-	2016	Baik
662	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2016	Baik
663	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Informa	2016	Baik
664	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Informa	2016	Baik
665	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2016	Baik
666	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	2016	Baik
667	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Front Line	2016	Baik
668	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Informa	2016	Baik
669	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2016	Baik
670	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Indachi	2016	Baik
671	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Informa	2016	Baik
672	Handy Talky (HT)	Alinco / DJ. CR X1	2016	Baik
673	P.C Unit	Lenovo / 510	2016	Baik
674	P.C Unit	Lenovo / 300	2016	Baik
675	P.C Unit	Lenovo / All in One 300 Intel Skylake	2016	Baik
676	P.C Unit	Lenovo / 510	2016	Baik
677	Lap Top	Lenovo / Flex 3-1480	2016	Baik
678	Lap Top	Dell Vostro / 5480	2016	Baik
679	Monitor	HP	2016	Baik
680	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Dot Matrik LX 310	2016	Baik
681	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L565	2016	Baik
682	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MX 497	2016	Baik
683	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Inkjet	2016	Baik
684	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L655	2016	Baik
685	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2016	Baik
686	External	-	2016	Baik
687	External	Saegate	2016	Baik
688	Server	-	2016	Baik
689	Peralatan Jaringan lainnya	-	2016	Baik
690	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	-	2016	Baik
691	Ensynclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	2016	Baik
692	Buku Umum Lain-lain	-	2016	Baik
693	Ekonomi	-	2016	Baik
694	Management dan Perkantoran	-	2016	Baik
695	Lemari Kayu	Lokal	2017	Baik
696	Lemari Kayu	Lokal	2017	Baik
697	Rak Besi	-	2017	Baik
698	Rak Kayu	Lokal	2017	Baik
699	CCTV - Camera Control Television System	-	2017	Baik
700	Meja Kerja Kayu	Lokal	2017	Baik
701	Kursi Rapat	Chitose	2017	Baik
702	Sofa	Bard	2017	Baik
703	A.C. Split	LG	2017	Baik
704	A.C. Split	Sharp	2017	Baik
705	Televisi	Sharp	2017	Baik
706	Unit Power Supply	ICA / 1200	2017	Baik
707	Unit Power Supply	-	2017	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
708	Stabilisator	MINAMOTO / SM 15000	2017	Baik
709	Camera Video	Sony / a6000 kit	2017	Baik
710	Camera Video	Canon / EOS 700D	2017	Baik
711	Dispenser	Sanken	2017	Baik
712	Karpet	-	2017	Baik
713	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Grand Furniture / 1 Biro	2017	Baik
714	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Grand Furniture	2017	Baik
715	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	APK	2017	Baik
716	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Grand Furniture / 1/2 Biro	2017	Baik
717	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Tiger	2017	Baik
718	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Indachi	2017	Baik
719	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Frontline	2017	Baik
720	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Brother Gold	2017	Baik
721	Handy Talky (HT)	Alinco / DC CRX 1	2017	Baik
722	Local Area Network (LAN)	Synology Diskstation DS / 216j	2017	Baik
723	P.C Unit	Acer / AC22760 Core i3 Screen	2017	Baik
724	Note Book	Yoga Lenovo / 520 Intel Core i5-8250U	2017	Baik
725	Hard Disk	Lenovo / System X 3650M5	2017	Baik
726	Monitor	LG / Led 20	2017	Baik
727	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / PIXMA MX-497	2017	Baik
728	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet / CP 1025 SN	2017	Baik
729	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Office Jet / 7612 SN	2017	Baik
730	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LX 310 SN	2017	Baik
731	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFJ-J3520	2017	Baik
732	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L565	2017	Baik
733	Server	Dell Poweredge / T30	2017	Baik
734	Server	Lenovo System / X 3250M6 One Intel	2017	Baik
735	Router	-	2017	Baik
736	Peralatan Jaringan lainnya	-	2017	Baik
737	Buku Umum Lain-lain	-	2017	Baik
738	Hukum	-	2017	Baik
739	Mesin Penghitung Uang	Prime Dynamic / 995EV	2018	Baik
740	Rak Besi	Indorack	2018	Baik
741	Alat Penghancur Kertas	Paper Shredder / Office	2018	Baik
742	Alat Penghancur Kertas	Origin	2018	Baik
743	Kursi Rapat	Phoenix	2018	Baik
744	Meubeleur lainnya	Siantano	2018	Baik
745	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Electrolux / VC-CW 3001 ES-1	2018	Baik
746	A.C. Split	LG / Dual Inverter	2018	Baik
747	Unit Power Supply	ICA	2018	Baik
748	Unit Power Supply	ICA / CS 1238	2018	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
749	Tangga Hidrolik	Krisbow	2018	Baik
750	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Custom	2018	Baik
751	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Frontline / ECD26	2018	Baik
752	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	OSHINTO / 533	2018	Baik
753	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Galant / SC 81 G Active	2018	Baik
754	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2018	Baik
755	Mainframe (Komputer Jaringan)	Dell Server Poweredge R330	2018	Baik
756	Mainframe (Komputer Jaringan)	Asus ROG GL503GE-EN023T	2018	Baik
757	P.C Unit	HP / AIO24i	2018	Baik
758	Note Book	Lenovo / Flex 5	2018	Baik
759	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L-120	2018	Baik
760	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ 2190 Dot Matrix	2018	Baik
761	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L405	2018	Baik
762	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120 Ink Tank	2018	Baik
763	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LX-310	2018	Baik
764	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / Inkjet Multifunction	2018	Baik
765	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Plustek	2018	Baik
766	Peralatan Jaringan lainnya	-	2018	Baik
767	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Honda / Honda HR-V RU1 1.5 E CVT	2019	Baik
768	Alat Penghancur Kertas	Krisbow / S290	2019	Baik
769	Mesin Absensi	OMEGA	2019	Baik
770	Meja Komputer	Asda Topan	2019	Baik
771	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Elektrolux	2019	Baik
772	Lemari Es	AQUA / Portable	2019	Baik
773	A.C. Split	Daikin	2019	Baik
774	A.C. Split	Panasonic	2019	Baik
775	A.C. Split	Samsung / AR09KRFLAWK N	2019	Baik
776	A.C. Split	Samsung / AR09KRFLAWK N	2019	Baik
777	Kipas Angin	SEKAI / KRISBOW TORNADO	2019	Baik
778	Unit Power Supply	ICA	2019	Baik
779	Unit Power Supply	ICA / 1600VA	2019	Baik
780	Unit Power Supply	Unit Power Supply (UPS) / PAC Smart	2019	Baik
781	Unit Power Supply	Unit Power Supply (UPS) / PAC Smart	2019	Baik
782	Camera Video	Logitech / BCC 950	2019	Baik
783	Mimbar/Podium	-	2019	Baik
784	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	frontline	2019	Baik
785	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Front Line	2019	Baik
786	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	USHINTO	2019	Baik
787	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Astrovis Office	2019	Baik
788	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	USHINTO	2019	Baik
789	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	USHINTO	2019	Baik
790	Unit Tranceiver Ssb Portable	KENWOOD / TM 281A	2019	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
791	Mainframe (Komputer Jaringan)	POWER EDGE / T340	2019	Baik
792	P.C Unit	HP / All In One	2019	Baik
793	P.C Unit	Lenovo / AIO 520-22ICB Gray	2019	Baik
794	P.C Unit	LENOVO / All In One	2019	Baik
795	P.C Unit	RYZEN / AMD	2019	Baik
796	P.C Unit	Lenovo / AIO 520-22ICB Gray	2019	Baik
797	Lap Top	Asus / TP410UF	2019	Baik
798	Lap Top	Lenovo / IP330-15ICH	2019	Baik
799	Monitor	Sumsung Curve / C24F390	2019	Baik
800	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFC	2019	Baik
801	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Ecotank L1110 Ink Tank	2019	Baik
802	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Ecotank L1110 Ink Tank	2019	Baik
803	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Ecotank L1110 Ink Tank	2019	Baik
804	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	2019	Baik
805	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / DCP 3530 DW	2019	Baik
806	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Multi fungsi	2019	Baik
807	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFC-J3530DW	2019	Baik
808	Server	DELL EMC Power Edge / R740	2019	Baik
809	Server	DELL EMC Power Edge / R740	2019	Baik
810	Peralatan Jaringan lainnya	-	2019	Baik
811	Hukum	-	2019	Baik
812	CCTV - Camera Control Television System	INFINITY / CAMERA OutDOR	2020	Baik
813	Acces Control System	HIKVISION / DOOR ACCES	2020	Baik
814	A.C. Split	Sharp / AH-A18SAY	2020	Baik
815	Treng Air/Tandon Air	Grand	2020	Baik
816	Sound System	DAT / 1511	2020	Baik
817	Unit Power Supply	APC / BACK-UPS (BX800LI-MS	2020	Baik
818	Unit Power Supply	ICA / 1200	2020	Baik
819	Unit Power Supply	APC BACK-UPS (BX800LI-MS	2020	Baik
820	Camera Video	Logitech VC	2020	Baik
821	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	PIMMA Perforator / TP 100	2020	Baik
822	Mesin Pembuat ID Card	Evolis / Ribbon black and colour included	2020	Baik
823	P.C Unit	Lenovo / AIO A340-221CB	2020	Baik
824	P.C Unit	INTEL CORE i5	2020	Baik
825	P.C Unit	INTEL CORE i5	2020	Baik
826	Lap Top	LENOVO / LEGION	2020	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
827	Lap Top	LENOVO / L340-151RH	2020	Baik
828	Lap Top	ASUS / TUF GAMING A15	2020	Baik
829	Lap Top	ASUS / X441UA-GA321T ROSE GOLD	2020	Baik
830	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / A3	2020	Baik
831	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / DOTMATRIX LQ-2190	2020	Baik
832	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / INKJET COLOR ECO TANK L5190	2020	Baik
833	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LASERJET ENTERPRISE M608N	2020	Baik
834	Server	Dell / Power Edge R470	2020	Baik
835	Pompa Air	Shimizu	2021	Baik
836	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu / Luxio 1.5 D MT MC E4	2021	Baik
837	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	LAKONI LAGUNA / CAR WASHER	2021	Baik
838	Lemari Kayu	Kayu	2021	Baik
839	Brandkas	KRISBOW / FIRE RESISTENT	2021	Baik
840	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Hikvision / DS-K1T341AMF	2021	Baik
841	A.C. Split	Sharp	2021	Baik
842	Unit Power Supply	APC / SMART SMT3000IC	2021	Baik
843	Unit Power Supply	APC / 1200 VA	2021	Baik
844	Unit Power Supply	APC / BX1400	2021	Baik
845	Unit Power Supply	APC / SMART C20001	2021	Baik
846	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2021	Baik
847	Kamera Udara	Mavic II / Drone	2021	Baik
848	Alat Kesehatan Umum lainnya	K9X	2021	Baik
849	P.C Unit	ACCER / Aspire c24-1651	2021	Baik
850	P.C Unit	LENOVO / ALL IN ONE	2021	Baik
851	P.C Unit	Lenovo	2021	Baik
852	P.C Unit	RAKITAN	2021	Baik
853	Lap Top	Asus	2021	Baik
854	Lap Top	DELL / Latitude 3410	2021	Baik
855	Lap Top	HP	2021	Baik
856	Monitor	LG / 24 IN	2021	Baik
857	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / DOT MATRIX LX-300	2021	Baik
858	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L5190	2021	Baik
859	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / INKJET L121	2021	Baik
860	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Dot matrix	2021	Baik
861	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / DOT MATRIX LQ-2190	2021	Baik
862	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LX 310 Dot	2021	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
863	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Dotmatrix / LX2190	2021	Baik
864	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Ecotank 3110	2021	Baik
865	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / Injeck	2021	Baik
866	Bahan perpustakaan tercetak lainnya	-	2021	Baik
867	Alat Penghancur Kertas	Secure Shredder Maxi	2022	Baik
868	Alat Penghancur Kertas	Primatech	2022	Baik
869	Mesin Antrian	-	2022	Baik
870	A.C. Split	Sharp	2022	Baik
871	Unit Power Supply	ICA / CN300	2022	Baik
872	Unit Power Supply	ICA / CT1082B	2022	Baik
873	Microphone/Wireless MIC	-	2022	Baik
874	P.C Unit	Acer AIO / C221700	2022	Baik
875	P.C Unit	HP / All In One	2022	Baik
876	Lap Top	HP	2022	Baik
877	Lap Top	Asus TUF F15 / FX506LHB-1565B6T-o11i5	2022	Baik
878	Lap Top	Asus TUF F15 / FX506LHB1565B 6T-O11i5	2022	Baik
879	Lap Top	Asus Vivobook Flip / TP1400KAN6000	2022	Baik
880	Lap Top	Acer Nitro 5 / AN515-58	2022	Baik
881	Lap Top	Asus Vivobook S14 Flip / TP3402ZACi5125 0OH	2022	Baik
882	Lap Top	Asus Vivobook S14Flip / TP3402ZACi5125 0OH	2022	Baik
883	Lap Top	Asus Vivibook S14Flip / TP3402ZACi5125 0OH	2022	Baik
884	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L121 Ecotack	2022	Baik
885	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank / L1210	2022	Baik
886	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank / L4260	2022	Baik
887	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank / L6260	2022	Baik
888	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Plustek Scanner Smartoffice / PS283	2022	Baik
889	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	-	2022	Baik
890	Rak Kayu	-	2023	Baik
891	Papan Visual/Papan Nama	-	2023	Baik
892	Mesin Absensi	Solution X 302-5	2023	Baik
893	Meja Rapat	-	2023	Baik
894	Meja Resepsionis	-	2023	Baik
895	Kursi Lipat	Matrix Folding	2023	Baik
896	A.C. Split	Polytron	2023	Baik
897	A.C. Split	Polytron PAC 18 VH	2023	Baik
898	Televisi	LG UHD	2023	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
899	Microphone	JTS CS -1 DU	2023	Baik
900	Microphone	Sennheiser skm 9000 mk II	2023	Baik
901	Unit Power Supply	APC SR78KXLi	2023	Baik
902	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2023	Baik
903	Camera Conference	Logitech / BC c950	2023	Baik
904	P.C Unit	Axioo / MyPC One Pro K5-24	2023	Baik
905	P.C Unit	Acer Aspire	2023	Baik
906	Lap Top	Lenovo Ideapad 5 pro 14	2023	Baik
907	Lap Top	Travelmate P214 Core -I7 (TMP214/0016	2023	Baik
908	Lap Top	Axioo	2023	Baik
909	Note Book	Lenovo / Gaming 3 AMD Ryzen 5-7535HS RTX 2050	2023	Baik
910	Monitor	AOC 22 B3 HM LED 22 Inch	2023	Baik
911	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother Inkject Multifungsi A3 MFC - T4500 DW	2023	Baik
912	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma E400	2023	Baik
913	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Ecotank L4260	2023	Baik
914	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank L3250	2023	Baik
915	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Workforce Pro WF-C579R	2023	Baik
916	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Dot Matrik SQ300	2023	Baik
917	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laser 150 nw	2023	Baik
918	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L5290	2023	Baik
919	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Inkject Cannon G 2020	2023	Baik
920	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laser Jet Color	2023	Baik
921	External/ Portable Hardisk	Seagate	2023	Baik
922	Server	Dell / Power Edge R750XS	2023	Baik
923	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota/Innova / Zenic 2.0 GHV CVT	2024	Baik
924	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki/APV / GC415V	2024	Baik
925	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki/APV / GC415V	2024	Baik
926	alat ukur universal lainnya (dst)	Unit	2024	Baik
927	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	-	2024	Baik
928	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	-	2024	Baik
929	CCTV - Camera Control Television System	Hilook 5 MP	2024	Baik
930	Papan Visual/Papan Nama	-	2024	Baik
931	Alat Kantor Lainnya	P.25	2024	Baik
932	Kursi Lipat	-	2024	Baik
933	Meja Komputer	-	2024	Baik
934	Sofa	Kirei	2024	Baik
935	A.C. Split	Panasonic	2024	Baik
936	A.C. Split	Panasonic	2024	Baik
937	A.C. Split	-	2024	Baik

No	Nama Barang	Merk Barang	Tahun	Kondisi Barang
938	A.C. Split	Panasonic	2024	Baik
939	A.C. Split	Panasonic	2024	Baik
940	Televisi	Samsung	2024	Baik
941	Televisi	Samsung	2024	Baik
942	Loudspeaker	JBL / EON 715	2024	Baik
943	Loudspeaker	Harman Kardon Onyx Studio	2024	Baik
944	Sound System	-	2024	Baik
945	Microphone	Nacamichi / PX 50	2024	Baik
946	Unit Power Supply	APC	2024	Baik
947	Unit Power Supply	APC	2024	Baik
948	Karpet	-	2024	Baik
949	Gordyin/Kray	-	2024	Baik
950	Gordyin/Kray	-	2024	Baik
951	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2024	Baik
952	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2024	Baik
953	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2024	Baik
954	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Savello	2024	Baik
955	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2024	Baik
956	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	-	2024	Baik
957	Kamera Udara	GPS Garmin Montana / 680	2024	Baik
958	Telephone (PABX)	Panasonic	2024	Baik
959	P.C Unit	AIO Acer / Ac24-1700i5Gen 12	2024	Baik
960	P.C Unit	Advan AIO 15 - 85 s	2024	Baik
961	Lap Top	Acer Travelmate P214 Core i7 + VGA	2024	Baik
962	Lap Top	Acer Travelmate	2024	Baik
963	Lap Top	MSI Sword	2024	Baik
964	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / DCP-T8200DW	2024	Baik
965	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L5290	2024	Baik
966	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFCT4500DW	2024	Baik
967	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother Inkject DCP - T520 W	2024	Baik
968	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / MFC-J3540DW	2024	Baik
969	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Dotmatrix / LX 310	2024	Baik
970	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Logitech	2024	Baik
971	Server	Acer Altos R3 / Intel Ceon	2024	Baik
972	Taman Permanen	-	2024	Baik

Sumber data : *Pengurus Barang Pengguna Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar per Januari 2024.*

- Sarana Penunjang Lainnya

a. Server Aplikasi

Server aplikasi yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar sebanyak 9 (Sembilan) buah, yaitu :

a. Server aplikasi SILAKAS

b. Server Aplikasi ZNT

- c. Server Aplikasi BPHTB
 - d. Server aplikasi SIMDA BMD;
 - e. Server aplikasi PAJAK ONLINE;
 - f. Server aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);
 - g. Server aplikasi SIMPATDA (Sistem Manajemen Pendapatan Daerah).
 - h. Server Intan Dara (Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah)
 - i. Server Si Langkar (Sistem Pengelolaan Keuangan Kabupaten Banjar)
- b. Ruang Pelayanan Pendapatan
- Ruang pelayanan pendapatan merupakan ruangan yang digunakan untuk menerima wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak daerah ataupun konsultasi mengenai pajak daerah. Pada ruang pelayanan terdapat 1 (satu) loket teller dari Bank Kalsel, sehingga pembayaran tidak lagi melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
- c. Ruang Pelayanan Pengelolaan Keuangan
- Ruang pelayanan Pengelolaan Keuangan merupakan ruangan yang digunakan untuk menerima Konsultasi dan pelayanan bagi SKPD terkait anggaran, Perbendaharaan, akuntansi, dan asset (BMD).

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Sasaran Kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis periode Tahun 2026-2029 sebagai berikut :
 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas sesuai dengan fungsi pelayan publik yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.
2. Uraian Kinerja Pelayanan BPKPAD Kabupaten Banjar diuraikan dalam tabel-tabel :
 - Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPAD Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2021-2026.
 - Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKPAD Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2021-2026.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar tidak termasuk dalam Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dikarenakan karena hanya OPD tertentu saja. Untuk Penilaian Publik diambil dari laporan SKM (Standar Kepuasan Masyarakat).

1. IKK Outcome adalah IKK (Indikator Kinerja Kunci) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran suatu program atau kegiatan pemerintah. Outcome adalah hasil langsung yang dirasakan oleh masyarakat atau penerima manfaat sebagai dampak dari suatu program atau kegiatan.

1.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Secara Tertib Dan Baik, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan komitmen perangkat daerah terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan hasil capaian.

- Pada tahun 2022 mencapai 96,02%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 85,18%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 113%,
- Pada Tahun 2023 mencapai 90% melebihi target yang ditetapkan sebesar 87,03%. Dengan demikian, rasio capaian indikator mencapai 103%.
- Pada tahun 2024 mencapai 80%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 88,88%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 90%,

1.2 Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik, menunjukkan bahwa kinerja penyerapan anggaran melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung kelancaran program pembangunan daerah. Dengan hasil capaian.

- Pada tahun 2022 mencapai 100%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 96,29%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 104%,

- Pada Tahun 2023 mencapai 99% melebihi target yang ditetapkan sebesar 98,14%. Dengan demikian, rasio capaian indikator mencapai 101%.
- Pada tahun 2024 mencapai 98%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 98,14%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 100%,

1.3 Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi melebihi target yang ditetapkan berarti seluruh perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan dengan kualitas yang masuk dalam kategori baik.

- Pada tahun 2022 mencapai 100%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 83,33%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 120%,
- Pada Tahun 2023 mencapai 100% melebihi target yang ditetapkan sebesar 85,18%. Dengan demikian, rasio capaian indikator mencapai 117%.
- Pada tahun 2024 mencapai 100%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 87,03%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 115%,

1.4 Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan perangkat daerah dalam mengelola aset daerah secara akuntabel, efisien, dan transparan.

- Pada tahun 2022 mencapai 100%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 85,18%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 117%,
- Pada Tahun 2023 mencapai 95% melebihi target yang ditetapkan sebesar 87,03%. Dengan demikian, rasio capaian indikator mencapai 109%.

- Pada tahun 2024 mencapai 88,88%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 88,88%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 100%,

1.5 Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), menunjukkan adanya Capaian ini mencerminkan kinerja yang stabil dalam optimalisasi pendapatan daerah, menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dan intensifikasi sumber-sumber PAD berjalan efektif sesuai perencanaan. Hal ini penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan.

- Pada tahun 2022 mencapai 4%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 4%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 100%,
- Pada Tahun 2023 mencapai 30% melebihi target yang ditetapkan sebesar 4%. Dengan demikian, rasio capaian indikator mencapai 750%.
- Pada tahun 2024 mencapai 13,61%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 4%. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini mencapai 340,25%,

1.6 Persentase peningkatan PAD adalah ukuran seberapa besar pertumbuhan PAD dari satu periode ke periode berikutnya, biasanya dari tahun ke tahun. Ini digunakan untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

- Pada tahun 2022 Pada tahun anggaran berjalan, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 94% terhadap total potensi PAD, pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 91,18%. Berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target, maka persentase capaian terhadap target mencapai 97%. Artinya, dari target yang telah direncanakan, sebanyak 97% berhasil dicapai. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas yang

tinggi dalam pemungutan PAD, meskipun masih terdapat selisih 3% dari target. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan yaitu Penerimaan Pajak Daerah Menurun, Retribusi Daerah Turun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Menurun Dan Penurunan Aktivitas Ekonomi. Namun di samping itu Hal ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemungutan PAD ke depan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta penguatan sistem pengelolaan fiskal daerah secara berkelanjutan.

- Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 95% dari total potensi PAD, realisasi pendapatan mencapai 111,04%, yang berarti melampaui target secara signifikan. Dengan capaian terhadap target sebesar 116,88%, hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD melebihi ekspektasi. Peningkatan ini dapat berasal dari efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta langkah-langkah strategis seperti digitalisasi pelayanan dan intensifikasi pajak daerah.
- Pada Tahun 2024 Dari target yang ditetapkan sebesar 96% terhadap total potensi PAD, realisasi yang berhasil dicapai mencapai 117,30%, atau dengan kata lain melebihi target yang direncanakan. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target mencapai 122,19%, yang menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil mengumpulkan PAD 22,19% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan kinerja optimal dalam pengelolaan pendapatan daerah, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Faktor pendukungnya antara lain peningkatan aktivitas ekonomi pasca-pandemi, efektivitas pemungutan, serta inovasi dalam digitalisasi layanan.

2. IKK Output Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau sub-kegiatan pemerintah. Output adalah hasil langsung atau produk dari suatu kegiatan, yang dapat diukur secara kuantitatif dan biasanya dicapai dalam jangka pendek.

2.1 Pada tahun anggaran 2020, 2023, 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berhasil mencapai kinerja maksimal dalam aspek pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal ketepatan waktu dan kesesuaian penyusunan serta pelaksanaan dokumen anggaran. Seluruh indikator kunci menunjukkan tingkat realisasi sebesar 100%, selaras dengan target yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang dimaksud meliputi:

- Persentase Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tepat Waktu Raperda APBD berhasil disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kepatuhan proses perencanaan anggaran.
- Persentase Penyelesaian SPD, SPP, dan SPM oleh SKPD Tepat Waktu Seluruh dokumen keuangan seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh SKPD telah diproses tepat waktu dan sesuai mekanisme yang berlaku, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan administrasi keuangan.
- Persentase Tersusunnya Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Raperda dan Raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun 100% tepat waktu dan telah memenuhi seluruh aspek substansi serta ketentuan regulatif yang berlaku, sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas penggunaan anggaran.
- Persentase Penyelesaian SPP dan SPM Belanja Pegawai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Proses penyelesaian dokumen belanja pegawai oleh SKPD dilakukan tepat waktu dan tanpa kendala administratif, sehingga hak-hak pegawai dapat

disalurkan secara lancar dan akurat. Capaian 100% pada seluruh indikator ini menandakan bahwa tata kelola keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas manajerial yang baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara profesional dan transparan.

2.2 Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan, Indikator ini mengukur sejauh mana pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD Pengelolaan BMD meliputi seluruh siklus pengelolaan barang mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan, hingga penghapusan dan pelaporan aset daerah.

- Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 91,75%, realisasi pengelolaan BMD mencapai 96,50%, sehingga persentase capaian terhadap target mencapai 105%. Artinya, pelaksanaan pengelolaan aset daerah melebihi ekspektasi yang telah direncanakan. Capaian ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan kinerja pengelolaan aset, baik dalam aspek pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, maupun pelaporan BMD, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD Pengelolaan BMD meliputi seluruh siklus pengelolaan barang mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan, hingga penghapusan dan pelaporan aset daerah. Peningkatan ini juga menunjukkan adanya perbaikan sistem dan pengawasan internal, serta komitmen dari perangkat daerah dalam menjaga dan mengelola aset daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel. Ke depan,

keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem pengelolaan aset, dan optimalisasi pemanfaatan BMD untuk mendukung pendapatan dan pelayanan publik.

- Pada Tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 93,25%, realisasi pengelolaan BMD mencapai 96%, sehingga persentase capaian terhadap target adalah 103%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mampu memenuhi target, tetapi juga melampaui ekspektasi yang telah ditentukan. Capaian ini juga berkontribusi terhadap peningkatan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, serta menjadi indikator penting dalam mendukung kemandirian dan efisiensi pengelolaan sumber daya milik daerah. Ke depan, penguatan sistem informasi aset daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola BMD, dan pengawasan internal yang lebih konsisten akan terus didorong untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.
- Pada Tahun 2024 Pada tahun pelaporan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari target yang ditetapkan sebesar 94%, realisasi pengelolaan BMD mencapai 94,75%, sehingga capaian terhadap target adalah 101%. Capaian ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah mampu melampaui target kinerja yang telah ditentukan, dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan dalam pengelolaan aset daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dengan realisasi ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah telah berjalan tertib, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan ini diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui optimalisasi sistem informasi aset dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola BMD.

2.3 Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi secara tahunan, sebagai wujud efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama tiga tahun terakhir, capaian persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang sangat positif:

- Pada Tahun 2022 Target peningkatan ditetapkan sebesar 4%, dengan realisasi 4%. Ini menunjukkan capaian 100%, sesuai dengan target yang direncanakan.
- Pada Tahun 2023 Terjadi lonjakan signifikan, dengan realisasi mencapai 30%, jauh melampaui target sebesar 4%. Capaian terhadap target mencapai 750%, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 serta keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
- Pada Tahun 2024 Realisasi peningkatan mencapai 13,61%, dengan target tetap sebesar 4%. Ini menghasilkan capaian sebesar 340,25%, menunjukkan keberlanjutan tren positif dalam penguatan sumber PAD melalui optimalisasi pemungutan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah.

2.4 Persentase peningkatan jumlah wajib pajak daerah yang patuh yaitu wajib pajak yang secara rutin memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku, seperti pembayaran tepat waktu, pelaporan pajak, dan kepatuhan administrasi lainnya.

Capaian indikator ini selama dua tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat baik:

- Pada Tahun 2022 Target kepatuhan sebesar 70% berhasil tercapai sesuai rencana. Ini menjadi landasan awal yang baik untuk program peningkatan kepatuhan di tahun-tahun berikutnya.
- Pada Tahun 2023 Terjadi lonjakan kepatuhan dengan realisasi mencapai 88,1%, atau capaian sebesar 126%. Peningkatan ini didorong oleh: Digitalisasi layanan perpajakan daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada wajib pajak

- Pada Tahun 2024: Capaian meningkat lagi menjadi 92%, atau 131% dari target. Hal ini menunjukkan keberhasilan berkelanjutan dalam membangun kesadaran pajak masyarakat, serta penguatan sistem informasi pajak dan kemudahan dalam proses administrasi pembayaran.

3. Indikator SDGs adalah Indikator SDGs (Sustainable Development Goals) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh PBB.

3.1 Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indikator SDGs ini berkaitan dengan tujuan SDGs ke-16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh yaitu Membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar khusus nya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Berkomitmen dalam Mendorong penguatan tata kelola keuangan yang baik (good governance), Menjadi tolok ukur kinerja akuntabilitas keuangan instansi pemerintah dan Mendukung keterbukaan informasi publik dan pembangunan berkelanjutan berbasis kepercayaan. Dibuktikan dengan Target 100%, Realisasi 100% dan Capaian 100% dari Tahun 2022 – 2024.

3.4 Indikator ini mengukur proporsi total pendapatan pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Indikator ini menjadi bagian dari SDGs Tujuan 17 (Kemitraan untuk Pembangunan), khususnya: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional, untuk meningkatkan kapasitas dalam mengumpulkan pendapatan domestik, terutama melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya.

- Pada Tahun 2022 Total pendapatan pemerintah terhadap PDB mencapai 0,96%, sesuai dengan target. Ini mencerminkan stabilitas awal dalam pemulihan pascapandemi COVID-19.
- Pada Tahun 2023 Terjadi peningkatan kapasitas fiskal dengan rasio pendapatan terhadap PDB naik menjadi 1,23%, menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja pendapatan daerah/nasional, baik dari pajak maupun retribusi dan sumber lainnya.
- Pada Tahun 2024 Rasio sedikit menurun ke 1,22%, namun masih sesuai target. Capaian ini tetap mengindikasikan konsistensi pemerintah dalam menjaga rasio pendapatan terhadap kapasitas ekonomi nasional.

3.3 Indikator ini mengukur rasio antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu pemerintah dalam membiayai pembangunan dari sumber pendapatan domestik. Memperkuat Kemitraan Global dan Meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui sistem perpajakan nasional yang efektif.

- Pada Tahun 2022 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB berada di angka 0,44%, sesuai target. Ini menunjukkan kemampuan fiskal pascapandemi mulai kembali stabil.
- Pada Tahun 2023 Terjadi penyesuaian target menjadi 0,42%, dan berhasil dicapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pengumpulan pajak daerah/nasional, meskipun beban ekonomi global dan nasional meningkat.
- Pada Tahun 2024 Rasio tetap pada 0,42%, sesuai dengan target. Ini mencerminkan stabilitas dalam kebijakan fiskal dan efektivitas dalam strategi pemungutan pajak.

3.4 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari total anggaran belanja pemerintah yang bersumber dari penerimaan pajak. Ini mencerminkan kemandirian fiskal dan ketergantungan terhadap pendanaan non-pajak seperti hibah, pinjaman, atau dana transfer. Kaitan dengan SDGs Tujuan 17

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dan Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui peningkatan kapasitas perpajakan nasional dan lokal.

- Pada Tahun 2022–2023 Proporsi anggaran yang didanai oleh pajak domestik stabil di 0,147%, sesuai target. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan pajak terhadap belanja daerah/nasional mulai menunjukkan kestabilan meskipun dalam masa pemulihan pasca-COVID-19.
- Pada Tahun 2024 Terjadi peningkatan target menjadi 0,153%, dan realisasi juga berhasil dicapai. Hal ini menandakan adanya perbaikan kapasitas fiskal, baik melalui perluasan basis pajak maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur strategis yang penting untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuannya secara efektif. IKU menjadi dasar dalam penilaian kinerja, evaluasi capaian pembangunan, serta pertanggungjawaban publik.

4.1 Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) merupakan indikator yang mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta aset daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat kepatuhan, ketertiban administrasi, dan kinerja tata kelola keuangan serta aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut capaian IPKAD selama tiga tahun terakhir:

- Pada Tahun 2022 Dengan target 91,48%, realisasi IPKAD mencapai 98,61%, atau capaian sebesar 107%. Peningkatan ini menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin tertib dan sesuai standar akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas pelaporan dan pengendalian internal.
- Pada Tahun 2023 Target meningkat menjadi 93,09%, dengan realisasi 94,34% dan capaian 101%. Meski capaian sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, kinerja pengelolaan keuangan dan aset tetap di atas target, menunjukkan konsistensi dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola daerah.

- Pada Tahun 2024 Target 94,34% berhasil dilampaui dengan realisasi 96,95%, menghasilkan capaian 103%. Hal ini mencerminkan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset yang terus diperbaiki, termasuk peningkatan sistem informasi manajemen aset, pelaporan yang transparan, dan pengawasan yang lebih ketat.

4.2 Persentase peningkatan PAD adalah ukuran seberapa besar pertumbuhan PAD dari satu periode ke periode berikutnya, biasanya dari tahun ke tahun. Ini digunakan untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

- Pada tahun 2022 Pada tahun anggaran berjalan, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 94% terhadap total potensi PAD, pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 91,18%. Berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target, maka persentase capaian terhadap target mencapai 97%. Artinya, dari target yang telah direncanakan, sebanyak 97% berhasil dicapai. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam pemungutan PAD, meskipun masih terdapat selisih 3% dari target. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan yaitu Penerimaan Pajak Daerah Menurun, Retribusi Daerah Turun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Menurun Dan Penurunan Aktivitas Ekonomi. Namun di samping itu Hal ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemungutan PAD ke depan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta penguatan sistem pengelolaan fiskal daerah secara berkelanjutan.
- Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 95% dari total potensi PAD, realisasi pendapatan mencapai 111,04%, yang berarti melampaui target secara signifikan. Dengan capaian terhadap target sebesar 116,88%, hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD melebihi ekspektasi. Peningkatan ini dapat

berasal dari efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta langkah-langkah strategis seperti digitalisasi pelayanan dan intensifikasi pajak daerah.

- Pada Tahun 2024 Dari target yang ditetapkan sebesar 96% terhadap total potensi PAD, realisasi yang berhasil dicapai mencapai 117,30%, atau dengan kata lain melebihi target yang direncanakan. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target mencapai 122,19%, yang menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil mengumpulkan PAD 22,19% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan kinerja optimal dalam pengelolaan pendapatan daerah, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Faktor pendukungnya antara lain peningkatan aktivitas ekonomi pasca-pandemi, efektivitas pemungutan, serta inovasi dalam digitalisasi layanan.

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	IKK OUTCOME															
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	85,18%	87.03%	88.88%	90.73%	92.58%	96,02%	90%	80%	0	0	113%	103%	90%	0	0
2	Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	96.29%	98.14%	98.14%	100%	100%	100%	99%	98%	0	0	104%	101%	100%	0	0
3	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	83.33%	85.18%	87.03%	88.88%	90.73%	100%	100%	100%	0	0	120%	117%	115%	0	0
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	85.18%	87.03%	88.88%	90.73%	92.58%	100%	95%	88.88%	0	0	117%	109%	100%	0	0
5	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	4%	4%	4%	4%	4%	4%	30%	13,61%	0	0	100%	750%	340,25%	0	0
6	Persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD)	94%	95%	96%	98%	100%	91,18%	111.04 %	117.30%	0	0	97%	116,88 %	122,19%	0	0
	IKK OUPUT															

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0
2	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0
3	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0
4	Persentase penyelesaian SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0
5	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	91.75%	93.25%	94%	94.75%	95.50%	96.50%	96.0%	94.75%	0	0	105%	103%	101%	0	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
6	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	4%	4%	4%	4%	4%	4%	30%	13,61%	0	0	100%	750%	340,25%	0	0
7	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	70%	70%	70%	70%	70%	70%	88.1%	92.0%	0	0	100%	126%	131%	0	0
	Indikator SDGs															
1	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0
2	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0.96%	1.23%	1.22%	1.22%	1.22%	0.96%	1.23%	1.22%	0	0	100%	100%	100%	0	0
3	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.44%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.44%	0.42%	0.42%	0	0	100%	100%	100%	0	0
4	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	0.147%	0.147%	0.153%	0.159%	0.166%	0.147%	0.147%	0.153%	0	0	100%	100%	100%	0	0
	Indikator Kinerja Utama															
1	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)	91.84%	93.09%	94.34%	95.36%	97.08%	98.61%	94.34%	96.95%	0	0	107%	101%	103%	0	0
2	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	4%	4%	4%	4%	4%	30.00%	14.00%	0	0	100%	750%	350%	0	0

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

- Pada Tahun 2022 Untuk Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan realisi keuangan Rp. 259.518.544.196 dari Target Rp. 273.901.815.010 dengan capaian 94,75%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi Rp. 38.464.716.383 dari Target Rp. 45.507.003.661 dengan capaian 84,52%, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 219.047.854.505 dari Target Rp. 226.339.126.276 dengan capaian 96,78% , Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 693.063.728 dari Target Rp. 704.196.600 dengan capaian 98,42%, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 1.312.909.580 dari Target Rp. 1.351.486.451 dengan capaian 97,15%
- Pada Tahun 2023 Untuk Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan realisi keuangan Rp. 275.165.507.421 dari Target Rp. 285.527.442.669 dengan capaian 96,37%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi Rp. 42.511.376.283 dari Target Rp. 50.073.541.802 dengan capaian 84,90%, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 230.168.955.341 dari Target Rp. 232.822.808.900 dengan capaian 98,86% , Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 533.582.000 dari Target Rp. 540.730.450 dengan capaian 98,68%, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 1.951.593.797 dari Target Rp. 2.090.361.517 dengan capaian 93,36%
- Pada Tahun 2024 Untuk Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan realisi keuangan Rp. 290.500.524.537 dari Target Rp. 317.454.041.037 dengan capaian 91,51%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi Rp. 58.603.104.952 dari Target Rp. 65.387.667.703 dengan capaian 89,62%, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 227.523.697.850 dari Target Rp. 246.929.621.600 dengan capaian 92,14% , Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 1.319.497.944 dari Target Rp. 1.484.015.000 dengan capaian 88,91%, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi keuangan Rp. 3.054.223.791 dari Target Rp. 3.652.734.710 dengan capaian 83,61%

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antar Realisasi dan Anggaran pada tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.507.003.661	50.073.541.802	65.387.667.703	0	0	38.464.716.383	42.511.376.283	58.603.104.952	0	0	84,52%	84,90%	89,62%	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	226.339.126.276	232.822.808.900	246.929.621.600	0	0	219.047.854.505	230.168.955.341	227.523.697.850	0	0	96,78%	98,86%	92,14%	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	704.196.600	540.730.450	1.484.015.000	0	0	693.063.728	533.582.000	1.319.497.944	0	0	98,42%	98,68%	88,91%	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.351.486.451	2.090.361.517	3.652.734.710	0	0	1.312.909.580	1.951.593.797	3.054.223.791	0	0	97,15%	93,36%	83,61%	0	0
JUMLAH	273.901.815.010	285.527.444.692	317.454.041.037	0	0	259.518.544.196	275.165.507.421	290.500.524.537	0	0	94,75%	96,37%	91,51%	0	0

Menurut undang-undang nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah. retribusi daerah. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Pengelolaan dan pemungutan pajak daerah diatur secara khusus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pajak daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas 9 (sembilan) pajak daerah. yaitu :

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

b. Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Penggolongan atau Pengelompokan Retribusi Daerah adalah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Daerah pada Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar; dan
- e. Pelayanan lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. pelayanan jasa kepelabuhan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Adapun SKPD Pemungut retribusi yaitu :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Komunikasi Informatika. Statistik dan Persandian;
 7. Dinas Kepemudaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 9. Dinas Pertanian;
 10. Dinas Koperasi Usaha Mikro. Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 12. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi :
1. Bagi Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan). yaitu :
 - Bank Kalsel; dan
 - Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
 2. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha). yaitu :
 - a. Perusahaan Baramarta; dan
 - b. Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah.
 3. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum). yaitu PT.AM Intan Banjar.
- d. Lain-Lain PAD yang Sah
- Lain-lain PAD yang sah meliputi :
1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
 2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 3. Penerimaan Jasa Giro;
 4. Pendapatan Bunga;
 5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 7. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 9. Pendapatan dari Pengembalian;
 10. Pendapatan BLUD;

11. Pendapatan Denda Pelanggaran Peraturan Daerah;
12. Pendapatan Remunerasi; dan
13. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya;

2.8 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar-Daerah. yaitu:

1. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana otonomi khusus;
 - c. Dana keistimewaan; dan
 - d. Dana desa.
2. Transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.

2.9 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan terdiri atas:

1. Pendapatan Hibah; dan
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan Keuangan Daerah. memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Kebijakan di bidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri. Unsur pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas/badan atau instansi lain. Bapenda Banjar tetap berkewajiban membina dan memonitor

perkembangan terhadap segala kegiatan di bidang pendapatan atau penerimaan daerah. karena Bapenda bertugas sebagai koordinator dalam pencatatan dan pembukuan penerimaan asli daerah (PAD).

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari pajak daerah dan retribusi daerah. dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan yaitu :

1. Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. dengan penggunaan aplikasi berbasis online dan pemasangan alat perekam data transaksi;
2. Pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh dinas teknis penghasil terkait yang kemudian disetorkan langsung ke rekening kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima dengan melampirkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada pemegang kas daerah Kabupaten Banjar (Bank Kalsel Cabang Martapura);
3. Selanjutnya dinas teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Banjar cq. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

2.10 Kelompok Sasaran Layanan dan Mitra Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar memberikan Layanan ke semua OPD dan Kecamatan/ Kelurahan / Desa (Kabupaten Banjar) di Kabupaten Banjar.

Adapun mitra perangkat daerah yang telah atau sedang memiliki kerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Dukungan lintas sector di Kabupaten Banjar yaitu semua OPD terkait dengan :
 - Penyusunan Anggaran APBD
 - Penyusunan Laporan Keuangan OPD
 - Penatausahaan keuangan OPD
 - Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Bappedalitbang Kabupaten Banjar. Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda Banjar dalam hal pendampingan penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja
3. Lembaga/Instansi Pemerintah/Swasta dan Pelaku Usaha dalam pembayaran pajak daerah :
 - Pajak air tanah
 - pajak hiburan
 - Pajak Hotel
 - Pajak MBLB (mineral bukan logam dan batuan)
 - Pajak Parkir
 - Pajak Reklame
 - Pajak Restoran
 - Pajak wallet
 - PBB/P2 (Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan)
 - Opsen Pajak
4. Bagian Hukum Setda Banjar terkait dengan penyusunan Raperda Raperbub RKA dan DPA/DPPA serta Perda/perbub Pajak dan retribusi.
5. Badan Pertahanan Nasional terkait Aset berupa tanah untuk sertifikasi dan penyajian data status tanah untuk pembayaran pajak.
6. Bank Kal Sel untuk deposit Kas Daerah
7. Kantor Samsat Kabupaten Banjar terkait Pajak Opsen Kendaraan roda dua dan roda empat

2.11 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dimasa depan dengan berbagai kondisi yang selalu mengalami perubahan. maka perlu mempersiapkan diri dalam rangka menuju keadaan yang lebih baik. Untuk mempersiapkan diri menuju keadaan

yang lebih baik tersebut. sebelumnya harus mempertegas dan memperjelas apa yang akan dicapai dimasa depan selama kurun waktu 2025 sampai 2029 dengan memperhitungkan kekuatan. kelemahan. peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta dibarengi dengan tindakan yang terencana dengan berbagai simulasi. antisipasi untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana strategis yaitu dengan menetapkan visi. misi. tujuan. sasaran. strategi. kebijakan. program dan kegiatan.

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut yang paling memungkinkan untuk dioptimalisasikan adalah Pendapatan Asli Daerah. karena dua sumber penerima lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah. retribusi daerah. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. tanpa disadari akan melupakan substansi nilai nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021-2026 sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya. maka dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut :

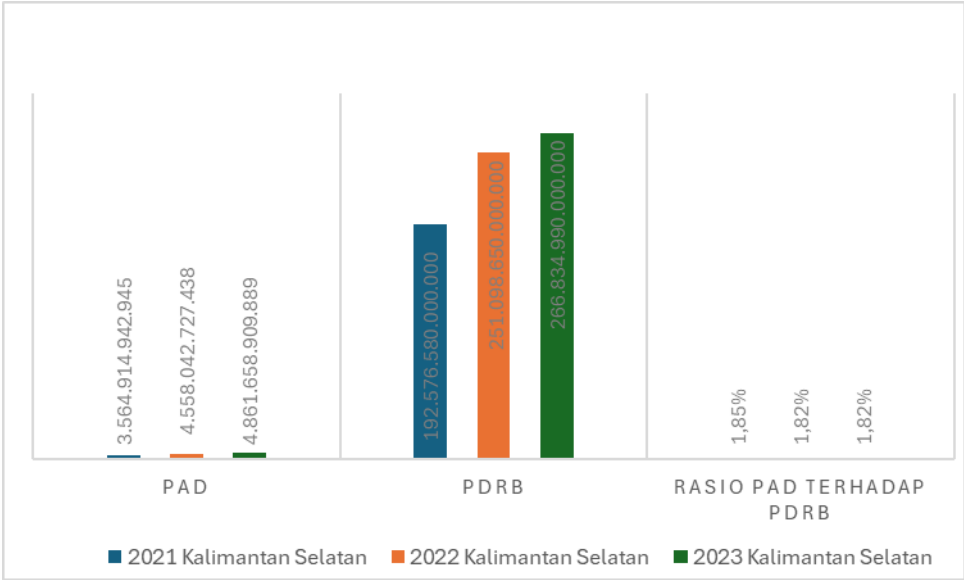
Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. Misi ke 2 yaitu : Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menjaga Rasio PAD terhadap PDRB menunjukkan sejauh mana daerah

bisa membiayai pembangunan dari sumber daya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

1. Belum optimalnya penagihan pajak daerah
2. belum optimalnya pendataan objek pajak daerah

Adapun perbandingan untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 – 2023 mengenai Rasio PAD terhadap PDRB.

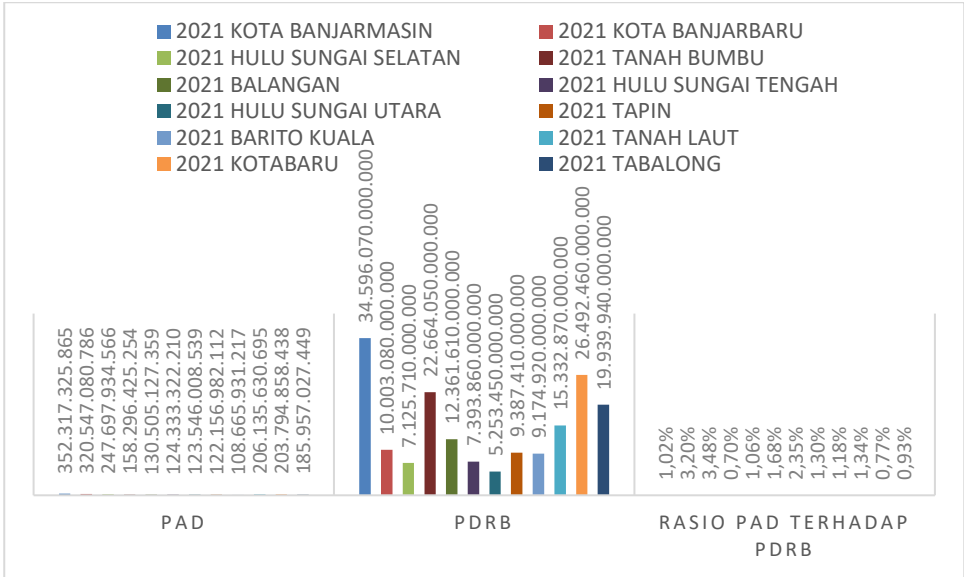
Tabel 2.8 Rasio PAD terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : Lra Provinsi Kalimantan Selatan

Selama periode 2021–2023, PAD Kalimantan Selatan terus mengalami pertumbuhan secara nominal. Namun, pertumbuhan PDRB yang sebanding atau bahkan lebih tinggi menyebabkan rasio PAD terhadap PDRB cenderung stagnan di kisaran Tahun 2021 dan Tahun 2022 1,82%, dan Untuk Tahun 2023 1,85%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total output ekonomi daerah belum mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun secara absolut penerimaan daerah bertambah.

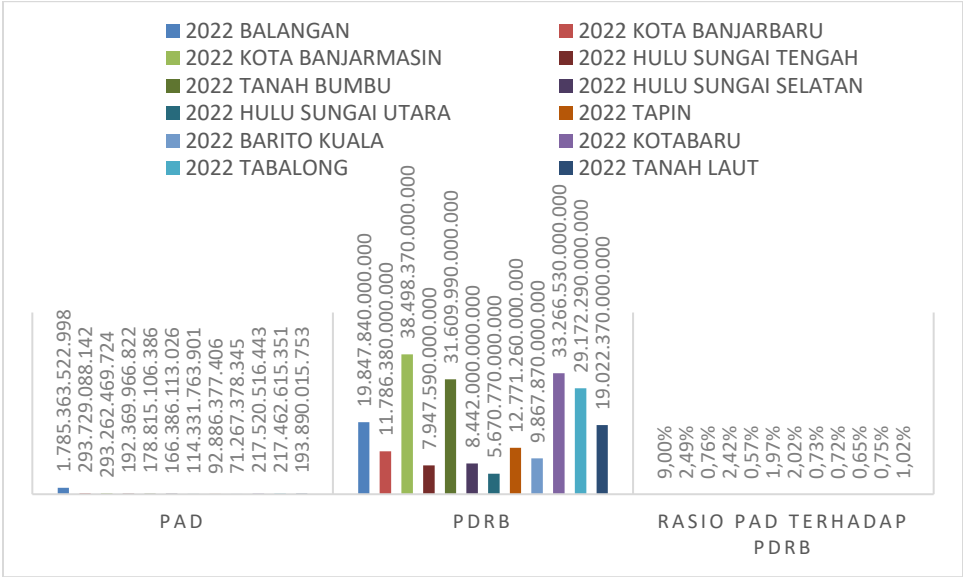
Tabel 2.10 Rasio PAD terhadap PDRB untuk 12 Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber : LRA Kabupaten/Kota 2021

Daerah dengan Rasio PAD terhadap PDRB Tertinggi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (3,48%) PAD: 247.697.934.566 dan PDRB: 7.125.710.000.000 Ini merupakan rasio tertinggi di provinsi. Angka ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif kuat dibandingkan ukuran ekonominya, Kota Banjarbaru (3,20%) PAD: 320.547.080.786 PDRB: 10.003.080.000.000 Sebagai kota administratif yang berkembang pesat, rasio PAD ini menunjukkan kemampuan Banjarbaru memanfaatkan potensi lokal dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (2,35%) PAD: 123.546.008.539 dan PDRB: 5.253.450.000.000. Meskipun PDRB relatif kecil, PAD-nya cukup signifikan, meningkatkan rasio. Terdapat kesenjangan fiskal antar daerah di Kalimantan Selatan. Beberapa kabupaten/kota dengan ekonomi besar justru memiliki rasio PAD rendah, menandakan ketergantungan pada dana pusat masih tinggi, atau potensi ekonomi daerah belum optimal dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. Sebaliknya, daerah dengan ekonomi kecil yang mampu menghasilkan PAD cukup besar menunjukkan kapasitas fiskal lokal yang lebih efisien atau proaktif dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Tabel 2.11 Rasio PAD terhadap PDRB untuk 12 Kabupaten/Kota Tahun 2022

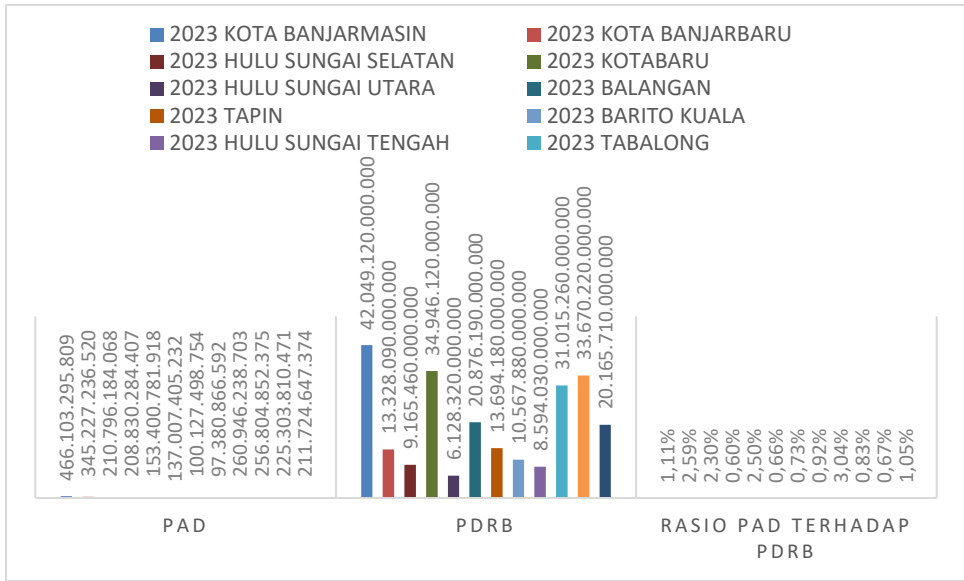


Sumber : LRA Kabupaten/Kota 2022

Daerah dengan Rasio Tertinggi Kabupaten Balangan Tahun 2022 – 9,00% PAD: 1.785.363.522.998 PDRB: 19.847.840.000.000 Ini adalah rasio PAD tertinggi secara signifikan di antara seluruh daerah. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa Balangan memiliki kinerja luar biasa dalam menggali potensi pendapatan asli daerah, baik dari pajak daerah, retribusi, maupun pendapatan lainnya. Peningkatan tajam dari tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya luar biasa dalam peningkatan fiskal lokal atau penerimaan dari sektor unggulan tertentu (misalnya pertambangan), Kota Banjarbaru – 2,49% PAD: 293.729.088.142 PDRB:

11.786.380.000.000, Kota Banjarbaru tetap berada pada posisi fiskal yang relatif kuat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah – 2,42% PAD: 192.369.966.822 PDRB: 7.947.590.000.000 Rasio yang tinggi ini menunjukkan pengelolaan PAD yang cukup baik dibandingkan skala ekonominya. Rasio yang tinggi ini menunjukkan pengelolaan PAD yang cukup baik dibandingkan skala ekonominya.

Tabel 2.12 Rasio PAD terhadap PDRB untuk 12 Kabupaten/Kota
Tahun 2023



Rasio PAD terhadap PDRB menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli yang berhasil digali oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total nilai ekonomi daerahnya. Pada tahun 2023, terdapat perbedaan mencolok antar kabupaten/kota, yang mengindikasikan ketimpangan dalam kemampuan fiskal lokal dan pengelolaan potensi daerah. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah (3,04%) PAD: 260.946.238.703, PDRB: 8.594.030.000.000 Menempati posisi tertinggi di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa HST cukup efektif dalam menggali potensi ekonomi lokal untuk mendanai kebutuhan fiskalnya, meskipun PDRB-nya termasuk kecil dibanding daerah lain, Kota Banjarbaru (2,59%) PAD: 345.227.236.520 PDRB: 13.328.090.000.000 Konsisten sebagai daerah dengan rasio PAD tinggi dalam tiga tahun terakhir, menandakan upaya yang serius dalam mendorong kemandirian fiskal, seiring pertumbuhan kota sebagai pusat baru pemerintahan dan ekonomi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (2,50%) PAD: 153.400.781.918 PDRB: 6.128.320.000.000 Rasio tinggi meskipun secara nominal kecil, menandakan efisiensi fiskal dan pemanfaatan potensi lokal secara maksimal.

Rasio PAD terhadap PDRB tahun 2023 menunjukkan ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah. Daerah seperti Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, dan Hulu Sungai Utara memperlihatkan kinerja fiskal yang baik, walau ekonominya kecil. Sebaliknya, daerah dengan ekonomi besar seperti Banjarmasin, Kotabaru, dan Tanah Bumbu masih memiliki rasio PAD yang rendah, mengindikasikan bahwa potensi ekonomi belum sepenuhnya dikelola untuk memperkuat PAD. Balangan perlu perhatian

khusus, karena terjadi penurunan rasio PAD yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Renstra BPKPAD mengampu misi ke 4 yaitu : Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani dengan arah kebijakan Aparatus Sipil Negara (ASN) yang profesional, Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi, Melanjutkan pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keterangan, dan Memperkuat aksi pencegahan korupsi.

1. Penentuan pagu anggaran belum mencerminkan *money follow function*
2. Belum optimal Keterkaitan perencanaan dan penganggaran
3. Laporan keuangan belum memenuhi SAP
4. belum optimal pengelolaan barang milik daerah
5. Belum optimal nya realisasi anggaran daerah

Tabel 2.13 Penentuan Pagu Anggaran belum mencerminkan Money Follow Function

NAMA SKPD	2024	2025	2026
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	26.307.078.912	53.486.126.750	53.228.513.480
Dinas Kesehatan	352.470.993.692	436.952.572.979	341.523.705.346
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	18.185.739.771	16.833.707.955	11.300.986.360
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	379.725.862.017	362.918.696.032	319.067.478.329
Dinas Pendidikan	733.869.905.693	721.375.017.898	438.967.289.142
Dinas Pertanian	52.303.202.802	56.249.523.141	51.438.720.894
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.175.029.644	22.842.483.448	22.208.412.222
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	66.265.271.138	13.383.639.700	16.286.677.400
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.389.895.423	13.685.023.818	12.462.593.613
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	317.454.039.013	319.131.364.553	307.669.842.667
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	16.554.949.916	17.553.309.985	16.323.156.527
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.483.262.751	10.955.224.425	10.502.688.401
Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	20.655.705.130	21.211.467.090	18.936.177.210
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	19.624.865.831	21.467.558.227	17.241.222.903
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	25.734.615.064	25.859.860.602	14.923.380.770
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	191.855.594.148	216.980.728.651	192.158.000.160
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.194.240.908	15.273.804.990	18.031.387.784
Dinas Perhubungan	18.128.478.967	24.291.142.969	13.757.051.411

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.586.782.361	8.736.980.130	8.133.891.530
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	93.826.972.321	126.797.597.591	97.665.000.569
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.841.956.259	47.177.831.171	27.663.204.224
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12.660.248.443	12.124.349.858	12.237.482.684
Inspektorat Daerah	20.046.993.895	17.954.341.561	19.500.938.661
Instalasi Farmasi Kabupaten	603.507.740	587.337.000	627.805.500
Kecamatan Aluh-Aluh	3.269.445.173	4.034.588.450	3.695.457.450
Kecamatan Aranio	2.847.716.747	3.132.942.207	2.749.217.094
Kecamatan Astambul	2.604.856.444	4.513.708.195	2.904.506.191
Kecamatan Beruntung Baru	2.712.328.614	3.757.586.845	2.996.250.518
Kecamatan Cinta Puri Darussalam	2.544.268.073	2.926.257.055	2.483.617.955
Kecamatan Gambut	5.168.250.392	5.639.616.000	5.288.536.000
Kecamatan Karang Intan	3.367.218.857	3.789.439.266	3.363.611.266
Kecamatan Kertak Hanyar	5.091.890.454	5.947.587.145	5.771.382.775
Kecamatan Martapura	10.440.795.995	11.384.932.670	11.009.192.270
Kecamatan Martapura Barat	3.165.627.872	3.772.780.000	3.376.380.000
Kecamatan Martapura Timur	3.291.177.652	3.862.627.000	3.401.320.999
Kecamatan Mataraman	3.004.569.771	3.572.298.093	3.181.718.548
Kecamatan Paramasan	2.421.484.167	2.570.554.000	2.526.354.000
Kecamatan Pengaron	3.628.865.249	3.708.432.000	3.393.536.000
Kecamatan Sambung Makmur	2.384.118.699	3.628.250.080	3.008.076.123
Kecamatan Simpang Empat	2.624.613.272	3.350.300.500	3.042.454.319
Kecamatan Sungai Pinang	2.631.828.048	2.956.428.160	2.591.298.104
Kecamatan Sungai Tabuk	5.200.375.761	4.274.332.833	4.146.984.333
Kecamatan Tatah Makmur	2.932.664.022	3.203.238.141	2.879.395.141
Kecamatan Telaga Bauntung	2.581.189.967	3.015.878.306	2.445.247.306
Kelurahan Gambut	756.814.121	913.900.920	896.551.920
Kelurahan Gambut Barat	711.826.421	729.563.420	712.214.420
Kelurahan Jawa	675.593.122	744.894.000	1.065.015.000
Kelurahan Keraton	928.999.000	1.386.462.000	1.312.130.000
Kelurahan Kertak Hanyar I	626.927.171	734.581.200	763.202.000
Kelurahan Manarap Lama	597.218.721	805.881.040	691.783.040
Kelurahan Mandar Sari	579.132.671	761.453.750	681.946.900
Kelurahan Murung Keraton	620.805.000	795.068.000	1.065.028.000
Kelurahan Pasayangan	624.253.000	880.052.000	1.065.033.000
Kelurahan Sekumpul	737.808.800	1.045.680.900	1.065.019.900
Kelurahan Sungai Lulut	857.542.200	970.103.000	932.800.000

Kelurahan Sungai Paring	706.730.122	1.008.860.100	1.065.021.660
Kelurahan Tanjung Rema Darat	636.785.000	863.276.300	1.065.017.000
Laboratorium Kesehatan Daerah	779.478.157	928.361.513	927.800.013
Puskesmas Aluh Aluh	3.800.758.526	3.821.360.302	2.609.061.070
Puskesmas Aranio	2.138.675.261	1.956.057.127	978.785.992
Puskesmas Astambul	3.364.505.253	3.615.028.000	2.590.976.200
Puskesmas Beruntung Baru	2.158.300.828	2.374.401.767	1.376.870.000
Puskesmas Cintapuri Darussalam	1.523.238.190	1.697.684.500	757.595.500
Puskesmas Gambut	4.179.730.027	4.263.001.697	3.113.830.000
Puskesmas Karang Intan 1	2.201.329.881	2.315.433.500	1.454.967.500
Puskesmas Karang Intan 2	3.282.746.411	3.638.267.000	2.467.003.900
Puskesmas Kertak Hanyar	3.362.816.502	3.719.648.220	2.767.474.500
Puskesmas Martapura 1	6.461.411.505	7.201.400.486	4.823.445.513
Puskesmas Martapura 2	2.938.546.142	3.353.980.955	2.242.368.000
Puskesmas Martapura Barat	2.396.479.367	2.463.895.900	1.582.087.000
Puskesmas Martapura Timur	2.801.993.209	3.352.979.212	2.035.825.000
Puskesmas Mataraman	2.297.425.824	2.831.393.018	1.667.851.618
Puskesmas Paramasan	1.151.794.680	1.178.013.608	558.016.480
Puskesmas Pengaron	2.683.723.860	3.195.181.517	1.911.746.567
Puskesmas Sambung Makmur	1.841.081.610	1.907.033.662	1.299.924.170
Puskesmas Simpang Empat 1	1.874.705.728	2.043.724.500	1.003.772.898
Puskesmas Simpang Empat 2	1.968.598.674	2.156.690.908	1.265.806.408
Puskesmas Sungai Pinang	1.720.193.639	1.981.556.660	1.065.752.660
Puskesmas Sungai Tabuk 1	3.018.892.526	3.394.457.000	2.351.552.450
Puskesmas Sungai Tabuk 2	1.824.125.930	2.036.051.140	1.010.899.140
Puskesmas Sungai Tabuk 3	2.091.986.491	2.531.954.320	1.941.424.088
Puskesmas Tatah Makmur	1.705.221.557	2.033.203.040	1.134.148.040
Puskesmas Telaga Bauntung	1.374.913.617	1.467.925.435	749.288.050
Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	206.159.289.682	208.137.290.821	186.067.762.447
Satuan Polisi Pamong Praja	21.599.622.062	27.486.067.156	23.107.303.630
Sekretariat Daerah	82.251.344.633	115.585.883.393	91.870.881.800
Sekretariat DPRD	101.447.855.600	95.573.796.477	97.623.854.134
UPTD Laboratorium Lingkungan		409.999.300	517.920.700
UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau	12.805.813.108	11.812.261.480	5.123.246.500
UPTD Public Safety Center 119 Banjar		488.949.900	555.371.940

Penurunan anggaran pada SKPD strategis seperti Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan bahwa prinsip Money Follow Function belum sepenuhnya diterapkan dalam penetapan pagu anggaran. Ke depan, perencanaan anggaran harus berbasis fungsi dan prioritas pembangunan, bukan sekadar kelanjutan anggaran historis.

Isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar :

1. Peningkatan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP
2. Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Daerah
3. Peningkatan Realisasi anggaran daerah
4. Peningkatan penyusunan perencanaan penganggaran yang tertib dan baik
5. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tabel 2. 14 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

ASPEK	Masalah Pokok	MASALAH	PENYEBAB MASALAH
Keuangan	belum optimalnya Pengelolaan keuangan daerah	Belum optimal Keterkaitan perencanaan dan penganggaran	Verifikasi rencana kerja anggaran tidak optimaloleh OPD
		Belum optimal pengelolaan barang milik daerah	RKMD belum optimal
		Belum optimal nya realisasi anggaran daerah	belum optimal nya pengawasan realisasi anggaran daerah
		Laporan keuangan belum memenuhi SAP	belum tertibnya penyusunan pelaporan keuangan OPD
	Belum optimalnya penerimaan pajak	Belum intensifikasi pemungutan pajak daerah	Belum optimalnya penagihan pajak daerah
		Belum Ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	Belum optimalnya pendataan objek pajak daerah

2.11 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Perangkat Daerah terpilih

2.11.1 Visi

Perumusan visi mencerminkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dalam hal ini pada tahun 2029 mendatang. Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar menjadi dasar utama dalam menyusun berbagai elemen pendukung, mulai dari misi, tujuan, hingga sasaran pembangunan jangka menengah. Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025- 2029 adalah:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN Keadilan**

Makna dari visi ini dijabarkan sebagai berikut:

Maju : kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat.

Mandiri : kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Agamis : kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai- nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar

Gotong Royong : kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong

royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

Keadilan : kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

2.11.2 Misi

Dalam pelaksanaannya, kondisi dan cita-cita yang telah dirumuskan melalui visi daerah dicapai melalui berbagai langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, terdapat empat misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 5.2Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
- 6.2Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
- 7.2Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
- 8.2Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar melalui RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban ikut mendukung pada misi ke empat yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih

dan melayani. dalam hal ini berperan sebagai unsur pelayanan Publik pada pembayaran pajak dan penatausahaan keuangan.

2.11.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjar

Tahapan ideal dalam penyusunan perencanaan lingkungan hidup dimulai dari penyusunan RPPLH, KLHS, RPJMD, sampai pada kebijakan/program. Di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut disebutkan bahwa KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB ke dalam dokumen RPJMD.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs/TPB disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

Pelaksanaan KLHS dimulai dengan mengidentifikasi dan merumuskan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam berdasarkan capaian TPB/SDG's dan menetapkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Dan berakhir dengan merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banjar.

Kabupaten Banjar terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat, memastikan transparansi, serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang diambil. Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai pendukung manajemen pelayanan public yang memiliki peran dalam mengontrol dan memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan baik. Berhasil tidaknya pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja

tata kelola pemerintahan. Kinerja tersebut dinilai dari sejauh mana penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas dan berdampak. Secara umum kinerja tata Kelola pemerintahan Kabupaten Banjar

Saat ini, akuntabilitas daerah belum berjalan optimal terutama dari sisi akuntabilitas kinerja. Untuk mencapai hal ini, dalam pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam peningkatan kualitas layanan publik. Penerapan system pelayanan berbasis digital perlu ditingkatkan lagi. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berupaya semaksimal mungkin dalam Peningkatan tersebut yaitu:

1. Digitalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

bpkpad menyediakan sistem online untuk pembayaran pajak daerah seperti pajak kendaraan, PBB, dan retribusi lainnya agar masyarakat bisa membayar lebih mudah dan transparan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan sistem digital.

bpkpad bisa menyajikan laporan keuangan daerah secara real-time dan terbuka untuk publik, mengurangi potensi korupsi.

3. Pengelolaan Aset Daerah Secara Terintegrasi sistem digital memudahkan pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset milik pemerintah daerah.

4. Peningkatan Pelayanan Publik masyarakat bisa mengakses layanan keuangan dan informasi secara online tanpa harus datang langsung ke kantor bpkpad.

5. Efisiensi dan Efektivitas Administrasi melalui sistem digital, proses administrasi keuangan dan pengelolaan pendapatan jadi lebih cepat, hemat biaya, dan minim kesalahan.

Dengan banyaknya layanan yang diberikan ke masyarakat melalui sitem digital tidak semua masyarakat memahami dengan system ini, perlu adanya Peningkatan SDM dalam pengelolaan layanan digital dan belum terintegritasnya system layanan secara penuh, terutama layanan pada pembayaran pajak daerah yang dipengaruhi oleh luasnya wilayah Kabupaten Banjar.

Impilikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berkaitan dengan pelayanan Pembayaran Pajak Daerah yang akan dikembangkan dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka BPKPAD Kabupaten Banjar melakukan identifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan BPKPAD Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

dalam RTRW. BPKPAD Kabupaten Banjar menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai RTRW tersebut. Jika struktur rencana tata ruang wilayah berubah secara otomatis akan terjadi perubahan layanan pembayaran Pajak.

2.12 Penentuan Isu-Isu Strategis dan Analisis Risiko Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2.12.1 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas dan Kemandirian Fiskal, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar telah mengidentifikasi delapan isu strategis utama yang menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan program strategis dalam periode 2025–2029. Isu-isu strategis ini mencerminkan tantangan aktual dan potensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Banjar yang harus segera direspons melalui kebijakan yang tepat.

1. Penentuan pagu anggaran belum mencerminkan money follow function

Dalam system penyusunan penganggaran setiap perangkat daerah dilarang mengusulkan anggaran berdasarkan pola copy-paste tahun sebelumnya tanpa justifikasi berbasis kinerja dan kebutuhan actual dan Alokasi anggaran akan diarahkan pada program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, RPJMD, dan Renstra perangkat daerah. Agar dalam proses penyusunan anggaran tahun N+1 Dengan kebijakan ini, diharapkan anggaran daerah menjadi instrumen yang lebih strategis dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2. Peningkatan manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan

Dalam proses pembangunan daerah yang efektif dan akuntabel sangat bergantung pada ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Lemahnya manajemen data dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam perencanaan, penganggaran yang tidak berbasis kebutuhan riil, serta kesulitan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja program, sehingga perlu adanya Pengelolaan data daerah mengacu pada prinsip Satu Data: standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas antar perangkat daerah dikoordinasikan secara konsisten dan Setiap perangkat daerah wajib melakukan pemutakhiran data secara berkala dan menggunakan data tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program, penganggaran, serta pelaporan capaian kinerja.

3. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan laporan keuangan OPD

Kualitas laporan keuangan OPD merupakan bagian penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan pemerintah daerah. Namun, masih ditemui permasalahan seperti kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian standar akuntansi, keterlambatan pelaporan, dan lemahnya analisis laporan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Maka untuk itu perangkat daerah perlu melakukan identifikasi dan pemetaan kompetensi ASN yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada tiap OPD agar kompetensi aparatur dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Seta Menjamin laporan keuangan OPD disusun secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

4. Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan seperti data aset yang tidak akurat, pemanfaatan yang tidak optimal, pencatatan yang tidak sesuai standar, hingga lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola BMD yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan seperti data aset yang tidak akurat, pemanfaatan yang tidak optimal, pencatatan yang tidak sesuai standar, hingga lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi ulang seluruh BMD secara periodik dengan mengutamakan validitas data, pelabelan aset, dan pemutakhiran informasi pada sistem informasi barang milik daerah.

Kebijakan ini menjadi pedoman dalam memperkuat tata kelola aset daerah yang tertib, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan pelayanan publik. Keberhasilan pelaksanaannya memerlukan komitmen dan koordinasi seluruh perangkat daerah.

5. Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi

Sektor properti dan investasi merupakan salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, potensi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak dari kegiatan properti, dan retribusi perizinan belum tergali secara optimal karena berbagai kendala, seperti basis data yang terbatas, lemahnya pengawasan, serta kurangnya sinergi antar perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap objek pajak properti, terutama kawasan perumahan baru, apartemen, ruko, serta kawasan industri serta Pemutakhiran NJOP secara

berkala berbasis data pasar agar potensi PBB mencerminkan nilai ekonomi riil lahan dan bangunan.

6. Peningkatan penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penilaian individual terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akurasi nilai objek pajak, keadilan perpajakan, dan optimalisasi pendapatan daerah. Saat ini, masih banyak objek PBB yang menggunakan pendekatan massal atau nilai lama yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal ini mengakibatkan potensi pajak yang tidak tergali secara maksimal dan ketimpangan dalam beban pajak antar wajib pajak.

Maka Pemerintah daerah perlu Menyusun daftar objek pajak prioritas untuk dinilai secara individual, seperti properti komersial, apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan hunian mewah dan Melakukan konsolidasi data dengan instansi terkait (BPN, Dinas Perizinan, Dinas Tata Ruang) untuk menjamin legalitas objek pajak dan memperbarui data secara berkelanjutan serta Melibatkan wajib pajak dalam proses penilaian dengan prinsip transparansi dan memberikan ruang keberatan sesuai mekanisme yang berlaku untuk menjaga kepercayaan publik.

7. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

Kemudahan dan kejelasan alur pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, masih banyak tantangan seperti proses yang berbelit, sistem manual, kurangnya kanal pembayaran, hingga minimnya informasi bagi wajib pajak

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu fokus pada penyederhanaan proses, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas sistem pelayanan perpajakan daerah dengan Memperluas kerja sama dengan bank daerah, bank swasta, fintech, dan loket online untuk menyediakan pilihan pembayaran yang mudah, cepat, dan aman (e.g., QRIS, e-wallet, mobile banking), serta Melaksanakan kampanye literasi perpajakan daerah secara berkelanjutan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban serta alur pembayaran yang benar.

Tabel 2. 15 Isu Starategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Belum optimalnya penagihan pajak daerah	Masih rendahnya penerimaan pajak daerah	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
	belum optimalnya pendataan objek pajak daerah					
Peningkatan penyusunan perencanaan anggaran yang tertib dan baik	belum optimal Keterkaitan perencanaan dan penganggaran	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan Tata Kelola yang Akuntabel dan Melayani
Peningkatan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP	Laporan keuangan belum memenuhi SAP					
Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Daerah	belum optimal pengelolaan barang milik daerah					
Peningkatan Realisasi anggaran daerah	Belum optimalnya realisasi anggaran daerah					

2.12.2 Analisis Risiko Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar mengidentifikasi sejumlah risiko strategis yang berpotensi menghambat

pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Risiko-risiko tersebut dianalisis secara menyeluruh untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Meskipun seiring berjalannya waktu, besar kemungkinan akan ditemukan risiko-risiko strategis baru sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi, kondisi sosial kultural masyarakat, budaya dan faktor-faktor lainnya.

Berikut adalah uraian terhadap risiko – risiko strategis dimaksud:

1. Penentuan pagu anggaran belum mencerminkan money follow function Analisis risiko sebagai berikut :

- Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Fungsi
- Klasifikasi Program Prioritas Daerah
- Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
- Peningkatan Kapasitas TAPD dan SKPD
- Monitoring dan Evaluasi Alokasi Pagu Berdasarkan Kinerja
- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Mitigasi terhadap ketidaksesuaian pagu dengan prinsip Money Follow Function harus menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan penganggaran berbasis fungsi dan kinerja, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan efisiensi belanja, tetapi juga menjamin capaian pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

2. Peningkatan manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan . penganggaran. Pelaksanaan. Pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan. Analisis risiko sebagai berikut :

- Data Perencanaan Tidak Akurat atau Tidak Terkini
- Penganggaran Tidak Berdasarkan Informasi Kinerja dan Output
- Kesenjangan Informasi dalam Pengendalian dan Monitoring
- Evaluasi Kinerja Tidak Didukung oleh Data yang Valid dan Terintegrasi
- Keamanan dan Keterpaduan Sistem Informasi Lemah

Peningkatan manajemen data dan informasi bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga membangun sistem yang terintegrasi, aman, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Dengan mitigasi risiko yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan seluruh proses dari perencanaan hingga evaluasi berbasis bukti dan terarah untuk hasil yang maksimal.

3. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan laporan keuangan OPD. Analisis Risiko sebagai berikut :

- Pelatihan akuntansi berbasis akrual secara berkelanjutan
- Penjadwalan dan pembagian tugas yang jelas
- Penerapan SOP dan checklist laporan keuangan
- Sistem knowledge management dan kaderisasi staf
- Pelatihan aplikasi keuangan (SIMD, SIPD dsb)

4. Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Daerah

Identifikasi Risiko adalah Risiko administrasi (data tidak akurat, pencatatan ganda, dll), Risiko hukum (status kepemilikan tidak jelas, sengketa aset), Risiko operasional (pemeliharaan tidak memadai, kehilangan/kerusakan barang), Risiko keuangan (aset tidak menghasilkan manfaat ekonomis) dan Risiko reputasi (temuan BPK, sorotan publik/media).

Penilaian Risiko. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko, Menyusun rencana aksi mitigasi, Penertiban aset melalui inventarisasi ulang, Digitalisasi manajemen BMD, Peningkatan kompetensi SDM pengelola aset dan Penguatan pengawasan dan audit internal. Pemantauan dan Evaluasi Monitoring berkala terhadap efektivitas mitigasi dan Penyesuaian kebijakan atau SOP sesuai dinamika di lapangan.

5. Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti. PBB P2 dan perijinan investasi

PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Objek: Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan untuk usaha properti. Pertumbuhan perumahan & apartemen, Pusat perbelanjaan dan kawasan industri, Lahan idle yang berpotensi dioptimalkan nilai jual objek pajaknya (NJOP), Sumber daya potensial Pemetaan NJOP yang belum diperbarui, Pengembang besar yang memiliki banyak lahan belum dimanfaatkan dan Properti tidak terdaftar yang belum dikenai pajak.

Strategi mitigasi risiko

1. Untuk PBB-P2

- Digitalisasi dan pemutakhiran basis data aset (gunakan GIS, drone, atau fotogrametri).
- Pemutakhiran NJOP secara berkala berdasarkan nilai pasar aktual.
- Audit properti besar (real estate audit) bekerja sama dengan BPN dan developer.
- Sinkronisasi data antar dinas (BPKAD, Bapenda, DPMPTSP, Dinas PU).
- Kampanye pemecahan PBB oleh developer saat rumah diserahkan.

2. Untuk Perizinan Investasi

- Penguatan sistem perizinan online (OSS, SIMBG) untuk transparansi dan akuntabilitas.
- One-door investment service yang mengintegrasikan pengawasan dan pendataan properti baru.
- Reward untuk investor taat pajak (misalnya melalui pemrosesan cepat izin)
- Audit kepatuhan izin dan retribusi secara periodik
- Sosialisasi dan asistensi pengembang kecil agar patuh izin dan pajak.

6. Peningkatan penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Identifikasi Objek Potensial Inventarisasi objek bernilai tinggi secara sistematis

Gunakan data dari: BPHTB (nilai transaksi jual beli), Dinas Perizinan (izin lokasi, IMB, SLF), Kantor Pertanahan (sertifikat HGB, SHM) dan Laporan investasi DPMPTSP

2. Penilaian Berbasis Pasar

Terapkan metode perbandingan data pasar dan/atau pendapatan (income approach) khususnya untuk properti komersial. Gunakan teknologi GIS dan sistem informasi geospasial (Peta Blok PBB)

3. Integrasi Pajak dengan Perizinan dan Investasi. Jadikan data penilaian PBB sebagai basis penilaian retribusi dan izin pemanfaatan ruang. Tautkan data NJOP dengan Penilaian Nilai Lahan untuk izin pemanfaatan dan Rencana pengembangan kawasan industri atau perumahan

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Audit penilaian dan pengenaan PBB secara sampling, Penegakan hukum atas manipulasi data atau penghindaran pajak dan Sanksi administrasi untuk keterlambatan pelaporan nilai transaksi

7. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

1. Registrasi Objek/Subjek Pajak

Input melalui aplikasi online (SmartGov dan SI Intan Dara atau mobile app)

2. Penetapan dan Penagihan

Otomatisasi SKPD dan STPD berdasarkan data sistem dan Notifikasi digital via email, SMS, atau aplikasi

3. Pembayaran

Terhubung ke kanal pembayaran resmi: QRIS, e-wallet, bank mitra, dan Referensi tagihan dengan kode bayar unik

4. Validasi dan Penerimaan

Validasi real-time melalui Smartgov ke sistem bank dan Updating sistem penerimaan daerah otomatis

5. Pelaporan dan Monitoring

Dashboard online untuk pemantauan PAD harian dan Laporan agregat untuk manajemen dan akuntabilitas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah (Renstra)

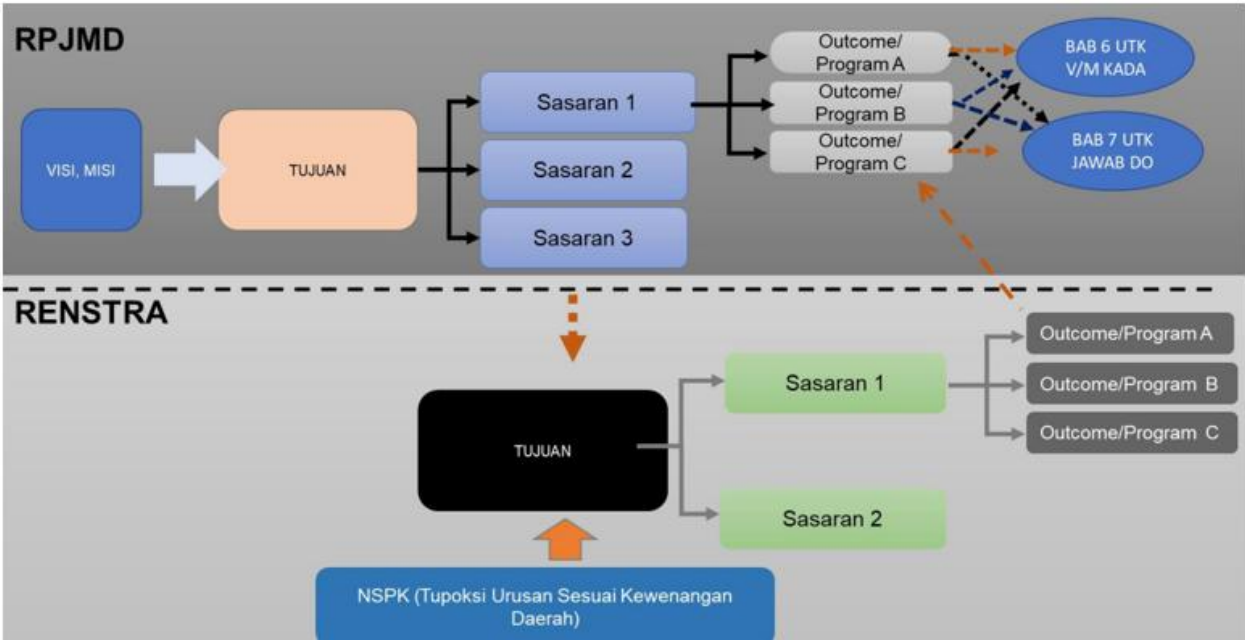
Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKPAD selama periode lima tahun (tahun 2025-2029) pada bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi yang telah ditetapkan diatas.

Tujuan dan sasaran strategis dalam **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** biasanya berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis yang bisa diterapkan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan tujuan strategis yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih baik dalam proses pengelolaan anggaran daerah.

Tujuan dan sasaran strategis dalam **Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah** Fokus pada peningkatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya, Melalui digitalisasi sistem pemungutan, pemutakhiran data objek pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, Mendorong BUMD untuk memberikan kontribusi terhadap PAD secara signifikan, Diukur dengan peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah setiap tahun, Optimalisasi aset melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, atau skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), Fokus pada efisiensi belanja rutin dan peningkatan proporsi belanja modal produktif, dan Termasuk penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta pengelolaan risiko fiskal.

Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKPAD. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BPKPAD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Untuk merealisasikan visi dan misi sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029, perlu ditetapkan tujuan BPKPAD Kabupaten Banjar (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang urusan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025 - 2029 adalah:

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah “

Untuk mencapai tujuan BPKPAD Kabupaten Banjar pada akhir Renstra periode 2025-2029 sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Tujuan, yaitu sebagai berikut:

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rasio PAD Terhadap PDRB

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), nyata (*Relevant*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran yang ingin dicapai oleh BPKPAD Kabupaten Banjar selama kurun tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel
2. Meningkatnya Pajak Dan Retribusi Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, perlu ditetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, dimana target kinerja tersebut harus bergerak naik secara linier dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dengan adanya peningkatan target kinerja, secara tidak langsung akan meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas di kabupaten banjar dapat terwujud.

Adapun indikator sasaran yang akan dicapai tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK
2. - Persentase Peningkatan Pajak Daerah

- Persentase Peningkatan Retribusi Daerah
3. - Nilai Sakip Perangkat Daerah
- Indeks Kepuasan Masyarakat

Adapun penetapan target tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2025 – 2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024						
					2025	2026	2027	2028	2029	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
	T.1		T.1							
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas dan Meningkatnya kemandirian fiskal-										
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Kemandirian Fiskal		Indeks Pengelola Keuangan Daerah	83,79	83,95	84,10	84,26	84,41	84,57	
			Rasio PAD terhadap PDRB (%)	1,310	1,316	1,323	1,329	1,336	1,342	
		Meningkatnya Pajak Dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	4%	5%	5%	5%	5%	5%	Program Pengelolaan Pendapatan
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	4%	5%	5%	5%	5%	5%	
		Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,14	81,30	81,60	81,90	82,20	84,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,00	75,00	78,00	81,00	85,00	87,00	

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar menyusun strategi yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Provinsi Kalimantan Selatan. dan Pemerintah Kabupaten Banjar. Strategi tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025–2029.

Penetapan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar untuk periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. 2 Penetapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP 1 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Penguatan landasan Transformasi - Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran - Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Realisasi Anggaran Daerah - Optimalisasi Laporan Keuangan sesuai SAP - Pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta digitalisasi sistem	Akselerasi Pembangunan: - Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran - Penerapan E-BMD - Memastikan pelaksanaan anggaran tepat waktu dan sesuai output yang direncanakan. - Mendorong opini WTP dari BPK dengan memperbaiki kualitas laporan keuangan. - Peningkatan Koordinasi	Peningkatan Daya Saing: - Digitalisasi Verifikasi Perencanaan dan Penganggaran - Pemanfaatan aset untuk meningkatkan PAD - Peningkatan Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Realisasi Anggaran Daerah -Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai SAP	Pemantapan Daya Saing: -Pemantapan Digitalisasi verifikasi perencanaan dan penganggaran - Penyempurnaan penerapan E-BMD -Pemantapan Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Realisasi Anggaran Daerah - Menjaga kualitas Laporan Keuangan sesuai SAP - Pengembangan budaya sadar pajak sebagai	Perwujudan Komprehensif: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas

pemungutan.	Retribusi dengan Pengampunan Retribusi	- Edukasi dan pengawasan terhadap wajib pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan.	bagian dari kewarganegaraan aktif.	
-------------	--	--	------------------------------------	--

1. Untuk Monitoring dan Evaluasi Tahap 1 yaitu Penguatan Landasan Transfromasi (Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik) yaitu :

- Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran
- Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Realisasi Anggaran Daerah
- Optimalisasi Laporan Keuangan sesuai SAP
- Pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta digitalisasi sistem pemungutan.

Ketiga langkah tersebut harus dilakukan oleh BPKPAD untuk Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik secara terus menerus.

2. Untuk Monitoring dan Evaluasi Tahap 2 yaitu Akselerasi Pembangunan adalah upaya mempercepat laju pembangunan melalui berbagai strategi, kebijakan, inovasi, dan investasi, agar tujuan pembangunan dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat dari proyeksi normal yaitu :

- Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran
- Penerapan E-BMD
- Memastikan pelaksanaan anggaran tepat waktu dan sesuai output yang direncanakan.
- Mendorong opini WTP dari BPK dengan memperbaiki kualitas laporan keuangan.
- Peningkatan Koordinasi Retribusi dengan Pengampunan Retribusi

3. Untuk Monitoring dan Evaluasi Tahap 3 yaitu Peningkatan Daya Saing adalah upaya untuk memperkuat kemampuan suatu negara, daerah, atau entitas (seperti perusahaan) agar dapat bersaing secara efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, maupun global. :

- Digitalisasi Verifikasi Perencanaan dan Penganggaran

- Pemanfaatan aset untuk meningkatkan PAD
- Peningkatan Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Realisasi Anggaran Daerah
- Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai SAP
- Edukasi dan pengawasan terhadap wajib pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan.

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahap 4: Pemantapan Daya Saing adalah Pemantapan daya saing adalah proses memperkuat dan menstabilkan kemampuan suatu entitas—baik itu negara, daerah, lembaga, maupun perusahaan—untuk bersaing secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika dan tantangan global atau lokal.

- Pemantapan Digitalisasi verifikasi perencanaan dan penganggaran
- Penyempurnaan penerapan E-BMD
- Pemantapan Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Realisasi Anggaran Daerah
- Menjaga kualitas Laporan Keuangan sesuai SAP
- Pengembangan budaya sadar pajak sebagai bagian dari kewarganegaraan aktif

5. Untuk Perwujudan Komprehensif Tahap V adalah proses mewujudkan suatu gagasan, rencana, atau kebijakan secara menyeluruh, terpadu, dan saling terhubung antarunsur. Istilah ini menekankan bahwa perwujudan (implementasi) tidak dilakukan secara parsial atau sektoral saja, tetapi melibatkan semua aspek yang relevan agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.

Tahap ini bertujuan untuk BPKPAD Menilai efektivitas strategi peningkatan PAD dan pengelolaan aset daerah, Mengidentifikasi capaian dan hambatan dalam implementasi kebijakan keuangan daerah dan Memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan daya saing fiskal daerah.

Seluruh strategi yang dirumuskan mempertimbangkan kondisi riil sumber daya, tantangan eksternal, kebutuhan masyarakat, serta dinamika regulasi Tata Kelola keuangan yang akuntabel. Dengan perencanaan strategi yang terarah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar diharapkan mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan daerah, perubahan demografi.

perkembangan teknologi informasi. serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat. mudah. dan terintegrasi. Selain itu. arah kebijakan juga disesuaikan dengan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2025 - 2029.

Melalui penetapan arah kebijakan yang terukur dan berorientasi hasil. kebijakan ini akan menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan secara efektif serta menjadi instrumen penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBUJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel	Penguatan sistem verifikasi internal berbasis indikator kinerja dan standar biaya.	
		Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal	Penguatan kapasitas SDM dalam penyusunan RKMD	
			Pengembangan sistem monitoring realisasi anggaran secara digital dan real-time.	
			Bimbingan teknis dan asistensi penyusunan	

			laporan keuangan di tiap OPD.	
			Penyusunan strategi penagihan berbasis segmentasi kepatuhan wajib pajak.	
			Pemutakhiran data secara berkala melalui sensus pajak dan pemetaan spasial (GIS).	

3.5 Penyandingan RPJMD Kabupaten Banjar, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJM Nasional

Penyandingan RPJMD Kabupaten Banjar, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJM Nasional bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, integrasi, dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah sehingga tercapai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Tabel 3. 4 Penyandingan RPJMD Kabupaten Banjar, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJM Nasional

RPJMD Kabupaten Banjar	RPJMD Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2025-2029	RPJM Nasional tahun 2025-2029
Misi 4 : Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan birokrasi yang professional bersih dan melayani	Misi 5 : Tata Kelola Pelayanan public yang mudah dan cepat	Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik.hukum.dan birokrasi.serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. narkoba. judi. dan penyelundupan

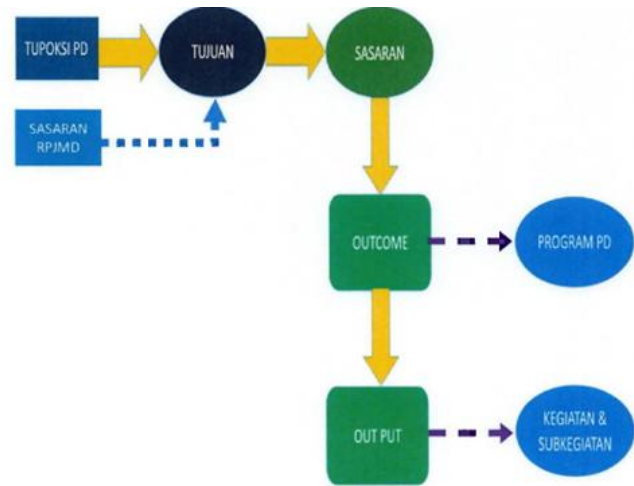
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional dan daerah dalam urusan pemerintahan bidang pengelolaan Keuangan daerah.

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Banjar merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Banjar yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu anggaran dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKPAD Kabupaten Banjar. Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi *outcome* program.

Menurut Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi. Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 4 (empat) program. 15 (lima belas) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut dapat dilihat seperti tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas dan Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				Indeks Pengelola Keuangan Daerah		
	Meningkatnya Kemandirian				Rasio Terhadap PDRB		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
	Fiskal Daerah						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
		Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel			Opini BPK		
			Meningkatnya tata kelola anggaran		Persentase Penerapan Perda APBD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Indeks Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Dalam APBD	Indeks Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Dalam APBD		
				Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	
				Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	
				Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
				Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
				Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
				Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	
			Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan		Persentase Perangkat Daerah Yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Penyerapan Belanja Daerah		Indeks Penyerapan Belanja Daerah		
			Meningkatnya Komponen		Indeks Komponen Pendukung Kondisi Keuangan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Pendukung Kondisi Keuangan				
				Terimplementasi penatausahaan belanja pegawai	Persentase penatausahaan belanja pegawai	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				Meningkatnya penyetoran pihak ketiga	Persentase penyetoran pihak ketiga tepat waktu		
				Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah dengan baik	Persentase Laporan Pertanggungjawaban penatausahaan perangkat daerah yang berkualitas		
				Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD		
				Tersalur nya belanja daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah		
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
				Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
				Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
						SP2D dengan Instansi Terkait	
				Tersedianya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
				Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
				Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
						SP2D dengan Instansi Terkait	
				Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas laporan keuangan Perangkat daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan		
				Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
				Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan		
				Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan pembiayaan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan		
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLo dan Beban	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
				Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan,	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
						Pendapatan dan Aset Daerah)	
				Tersedianya Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
				Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah daerah	
				Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang dibina	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
				Tercapainya penyerapan APBD	Persentase penyerapan APBD	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah	
				Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	
				Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	
				Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	
				Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
				Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terkelolanya Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	
				Terkelolanya Dana Abadi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Pengelolaan Dana Abadi Daerah	
				Tersalurnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah	
				Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
				Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Meningkatnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas		Indeks Pengelolaan Aset	Program Pengelolaan Barang Milik daerah	
				Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Kabupaten	Persentase realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik daerah	
				Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan		
				Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tepat waktu	Persentase waktu penetapan rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)		
				tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian	Persentase Pengguna Barang Yang Menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
				Terealisasinya Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	persentase Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD		
				Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD	Persentase sertifikat dokumen kepemilikan BMD berupa tanah		
				Tersedianya nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	persentase nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan		
				Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD		
				Tersusunnya laporan Semester I dan II Penatausahaan BMD	Persentase penyampaian Laporan BMD Semester I dan II BMD tepat waktu dan sesuai ketentuan		
				Terpenuhinya tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	Persentase tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	Persentase tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan		
				Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	Penyusunan Standar Harga	
				Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah	
				Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik daerah	
				Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan barang Milik daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik daerah	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang Milik daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan barang Milik daerah	
				Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
		Meningkatnya Pajak Dan Retribusi Daerah			Persentase Peningkatan Pajak Daerah		
					Persentase Peningkatan Retribusi Daerah		
			Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD		Rasio Pajak Terhadap PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah		Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD		
				Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Yang Ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Pembinaan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan retribusi daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah terkait		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Pengawasan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah Dari Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Terkait		
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	
				Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
				Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
				Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat daerah		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terkoordinir Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Umum Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Sumber : BPKPAD,2025

4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 4 (empat) program. 15 (lima belas) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan. Program / Kegiatan / SubKegiatan, Indikator, Target dan Pagu Indikatif untuk Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar selama 2025 – 2029 dapat dilihat seperti tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4. 2 Rencana Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan BPKPAD 2025 – 2029

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan					318.904.303.553		249.638.204.400		254.463.772.242		261.260.316.533		264.316.242.615	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	83,79	83,95	242.413.854.492	84,10	246.980.936.000	84,26	251.755.138.219	84,41	258.479.336.811	84,57	261.502.734.153	RPJMD
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Rasio PAD Terhadap PDRB	1,310	1,316	4.748.521.160	1,323	2.657.268.400	1,329	2.708.634.023	1,336	2.780.979.722	1,342	2.813.508.462	RPJMD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,14	81,30	35.870.963.951	81,60	34.015.819.384	81,90	34.499.048.000	82,20	35.420.492.500	84	35.834.801.000	RPJMD

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	75	35.870.963.951	78	34.015.819.384	81	34.499.048.000	85	35.420.492.500	87	35.834.801.000	RPJMD
	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	242.413.854.492	WTP	246.980.936.000	WTP	251.755.138.219	WTP	258.479.336.811	WTP	261.502.734.153	KEPALA BADAN
	Meningkatnya Pajak Dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	4	5	4.723.007.160	5	2.633.157.400	5	2.684.056.951	5	2.755.745.937	5	2.787.979.264	KEPALA BADAN
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	4	5	25.514.000	5	24.111.000	5	24.577.072	5	25.233.785	5	25.529.198	KEPALA BADAN
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Penerapan Perda APBD	85%	100%	1.317.880.600	100%	1.409.949.800	100%	1.437.204.480	100%	1.475.591.174	100%	1.492.850.964	KABID ANGGARAN
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah													
	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Indeks Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	11,34	11,44	396.229.600	11,54	473.485.800	11,64	482.638.398	11,74	495.529.318	11,84	501.325.461	KASUBBID PERENCANAA N ANGGARAN & KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN
	Meningkatnya Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Dalam APBD	Indeks Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Dalam APBD	13,70	13,71	921.651.000	13,81	936.464.000	13,91	954.566.082	14,01	980.061.856	14,11	991.525.504	KASUBBID ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2	43.849.400	2	33.700.000	2	34.351.428	2	35.268.931	2	35.681.467	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2	21.563.200	2	23.650.000	2	24.107.160	2	24.751.042	2	25.040.555	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.02.2.01. 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	2	70.846.500	2	107.534.500	2	109.613.170	2	112.540.857	2	113.857.232	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01. 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01. 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01. 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2	819.585.000	2	833.259.200	2	849.366.307	2	872.052.271	2	882.252.546	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01. 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2	51.254.000	2	60.620.000	2	61.791.800	2	63.442.214	2	64.184.289	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01. 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	2	50.812.000	2	42.584.800	2	43.407.975	2	44.567.370	2	45.088.669	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.02.2.01. 0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01. 0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2	259.970.500	2	308.601.300	2	314.566.640	2	322.968.488	2	326.746.206	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01. 0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.01. 0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
	Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	238.144.448.792	100%	233.025.584.500	100%	237.530.026.493	100%	243.874.282.374	100%	246.726.846.692	KEPALA BIDANG PERBENDAH RAAN
	Meningkatnya Penyerapan Belanja Daerah	Indeks Penyerapan Belanja Daerah	15	15	102.057.500	15	104.303.500	15	106.319.712	15	109.159.435	15	110.436.258	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Meningkatnya Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	Indeks Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	5,086	5,087	859.224.900	5,088	640.908.400	5,089	653.297.318	5,09	670.746.420	5,091	678.592.049	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah													
	Terimplementasi penatausahaan belanja pegawai	Persentase penatausahaan belanja pegawai	100%	100%	130.165.200	100%	152.231.200	100%	155.173.866	100%	159.318.449	100%	161.181.975	KASUBBID BELANJA PEGAWAI
	Meningkatnya penyetoran pihak ketiga	Persentase penyetoran pihak ketiga tepat waktu	100%	100%	36.235.500	100%	43.561.500	100%	44.403.554	100%	45.589.542	100%	46.122.796	
	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Perangkat Daerah Dengan Baik	Persentase Laporan Penatausahaan Perangkat Daerah Dengan Yang Berkualitas	100%	100%	238.108.213.292	100%	232.982.023.000	100%	237.485.622.939	100%	243.828.692.832	100%	246.680.723.896	KASUBBID PENGENDALIA N ANGGARAN
	Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	100%	100%	102.057.500	100%	104.303.500	100%	106.319.712	100%	109.159.435	100%	110.436.258	KASUBBID PENGELOLAA N BELANJA DAERAH

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Tersalur nya belanja daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	100%	100%	729.059.700	100%	640.908.400	100%	653.297.318	100%	670.746.420	100%	678.592.049	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	88 Dokumen	88	38.039.500	88	48.395.500	88	49.330.996	88	50.648.592	88	51.241.022	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	60	228.070.173.792	60	222.933.627.500	60	227.242.989.723	60	233.312.486.426	60	236.041.510.720	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.02.2.02. 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	36 Laporan	36.235.500	36 Laporan	43.561.500	36 Laporan	44.403.554	36 Laporan	45.589.542	36 Laporan	46.122.796	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.02. 0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.02. 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	47 Dokumen	47	102.057.500	47	104.303.500	47	106.319.712	47	109.159.435	47	110.436.258	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.02. 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.02. 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	47	729.059.700	47	640.908.400	47	653.297.318	47	670.746.420	47	678.592.049	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
	Meningkatnya Laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	100%	100%	659.277.200	100%	10.825.348.800	100%	11.034.605.216	100%	11.329.331.408	100%	11.461.849.190	KABID AKUNTANSI
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah													
	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan Perangkat daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	175.499.100	100%	179.018.200	100%	187.000.000	100%	194.750.000	100%	198.900.000	KASUBBID EVALUASI DAN PELAPORAN
	Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	100%	100%	157.122.300	100%	173.786.000	100%	178.999.130	100%	184.000.145	100%	186.395.061	KASUBBID AKUTANSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN
	Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan pembiayaan	Persentase Capaian Peaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan	100%	100%	150.523.800	100%	180.017.000	100%	180.400.000	100%	185.680.000	100%	190.750.000	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	102.182.200	100%	46.551.800	100%	27.500.000	100%	20.000.000	100%	15.250.000	KASUBBID AKUTANSI PENDAPATAN
	Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	100%	100%	73.949.800	100%	93.744.600	100%	112.230.000	100%	120.025.000	100%	121.400.000	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12	17.776.400	12	20.742.000	12	21.230.000	12	22.750.000	12	21.500.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	2	26.387.000	2	35.506.500	2	33.200.000	2	35.500.000	2	36.250.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18	28.798.600	18	38.463.500	18	39.200.000	18	40.180.000	18	42.500.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2	83.835.800	2	80.514.200	2	82.000.000	2	84.050.000	2	85.150.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.02.2.03. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	39.802.200	2	61.828.000	2	66.000.000	2	69.650.000	2	70.150.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03. 0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03. 0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1	16.371.200	1	11.174.600	1	25.000.000	1	27.625.000	1	29.750.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03. 0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1	102.182.200	1	46.551.800	1	27.500.000	1	20.000.000	1	15.250.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03. 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan AkuntansiPemerintah Daerah	1 Dokumen	1	51.938.400	1	53.636.000	1	57.000.000	1	58.500.000	1	59.750.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03. 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota	1 Dokumen	1	157.122.300	1	173.786.000	1	178.999.130	1	184.000.145	1	186.395.061	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dbina	27 Lembaga	27	39.724.900	27	44.868.000	27	48.000.000	27	52.200.000	27	54.000.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	95.338.200	1	106.047.000	1	108.000.000	1	110.000.000	1	112.000.000	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah													KASUBBID PENGENDALIA N ANGGARAN
	Tercapainya penyerapan APBD	Persentase penyerapan APBD	Persentase	20	10.000.000.000	20	10.000.000.000	20	10.193.302.220	20	10.465.557.814	20	10.587.972.154	
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.02.2.04. 0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.04. 0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.04. 0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.04. 0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.04. 0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.04. 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.04. 0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	20 Laporan	20	10.000.000.000	20	10.000.000.000	20	10.193.302.220	20	10.465.557.814	20	10.587.972.154	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.04. 0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.02.2.04. 0011	Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah													KASUBBID BELANJA PEGAWAI
	Terimplementasi penatausahaan belanja pegawai	Persentase penatausahaan belanja pegawai	Persentase	100%	130.165.200	100%	152.231.200	100%	155.173.866	100%	159.318.449	100%	161.181.975	
5.02.02.2.05. 0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.05. 0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3734 Dokumen	3.734	130.165.200	3.734	152.231.200	3.734	155.173.866	3.734	159.318.449	3.734	161.181.975	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.02.2.05. 0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
5.02.03	Meningkatnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Indeks Pengelolaan Aset	2,70	2,71	1.330.965.500	2,72	974.841.000	2,73	993.685.000	2,74	1.020.226.000	2,75	1.032.159.000	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah													
	Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Kabupaten	Persentase realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	100%	100%	306.894.000	100%	9.380.000	100%	9.561.317	100%	9.816.694	100%	9.931.518	KASUBBID PERENCANAA N DAN PEMANFAATA N BMD
	Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan	100%	100%	434.609.500	100%	89.988.000	100%	91.727.582	100%	94.177.939	100%	95.279.081	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tepat waktu	Persentase waktu penetapan rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	100%	100%	36.485.000	100%	72.272.000	100%	73.669.031	100%	75.636.683	100%	76.521.395	
	tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian	Persentase Pengguna Barang Yang Menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	KASUBBID PENGAMANAN DAN PENGHAPUSA N BMD
	Terealisasinya Tindakanlajut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	persentase Tindakanlajut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	70%	70%	23.272.500	70%	29.202.000	70%	29.766.481	80%	30.561.523	90%	30.918.997	
	Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD	Persentase sertifikat dokumen kepemilikan BMD berupa tanah	70%	70%	102.417.500	70%	165.279.000	70%	168.473.883	80%	172.973.700	90%	174.996.950	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	100%	100%	117.252.500	100%	172.866.000	100%	176.207.542	100%	180.913.919	100%	183.030.045	KASUBBID PENATAUSAH AAN BMD
	Menurunnya Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase Penurunan Terhadap Jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	100%	100%	13.854.000	100%	26.910.000	100%	27.430.176	100%	28.162.817	100%	28.492.234	
	Tersusunnya laporan Semester I dan II Penatausahaan BMD	Persentase penyampaian Laporan BMD Semester I dan II tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
	Terpenuhinya tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	Persentase tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	90%	85%	41.816.500	87%	129.295.000	90%	131.794.304	90%	135.314.435	95%	136.897.190	
	Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	Persentase tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	100%	100%	254.364.000	100%	279.649.000	100%	285.054.684	100%	292.668.290	100%	296.091.591	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1	295.570.000	1	36.286.000	1	36.987.499	1	37.975.798	1	38.419.551	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.03.2.01. 0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	111.964.000	1	12.132.000	1	12.366.525	1	12.696.815	1	12.845.328	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	36.485.000	1	72.272.000	1	73.669.031	1	75.636.683	1	76.521.395	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	27.075.500	1	41.570.000	1	42.373.558	1	43.505.326	1	44.014.201	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	6	254.364.000	6	279.649.000	6	285.054.684	6	292.668.290	6	296.091.591	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	2	13.854.000	2	26.910.000	2	27.430.176	2	28.162.817	2	28.492.234	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2	102.417.500	2	165.279.000	2	168.473.883	2	172.973.700	2	174.996.950	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.03.2.01. 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2	306.894.000	2	9.380.000	2	9.561.317	2	9.816.694	2	9.931.518	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4	23.272.500	4	29.202.000	4	29.766.481	4	30.561.523	4	30.918.997	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2	117.252.500	2	172.866.000	2	176.207.542	2	180.913.919	2	183.030.045	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.03.2.01. 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94 Orang	94	41.816.500	94	129.295.000	94	131.794.304	94	135.314.435	94	136.897.190	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Rasio Pajak Terhadap PAD	4%	44,00%	4.723.007.160	45%	2.633.157.400	46%	2.684.056.951	47%	2.755.745.937	48%	2.787.979.264	KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN
	Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD	4%	6,00%	25.514.000	6,1%	24.111.000	6,2%	24.577.072	6,3%	25.233.765	6,4%	25.529.198	KABID PENGENDALIAN PENGEMBANGAN
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah													
	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100%	100%	4.548.083.260	100%	2.475.136.400	100%	2.522.981.106	100%	2.590.368.208	100%	2.620.667.389	KASUBBID PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI, KASUBBID PENILAIAN DAN PENETAPAN OBJEK PENDAPATAN DAN KASUBBID PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN VALISASI OBJEK PENDAPATAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	174.923.900	100%	158.021.000	100%	161.075.845	100%	165.377.729	100%	167.311.875	KASUBBID PELAYANAN DAN KONSULTANSI
	Meningkatnya Pembinaan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan retribusi daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah terkait	100%	100%	12.757.000	100%	12.055.500	100%	12.288.536	100%	12.616.893	100%	12.764.599	KASUBBID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
	Meningkatnya Pengawasan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah Dari Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Terkait	100%	100%	12.757.000	100%	12.055.500	100%	12.288.536	100%	12.616.893	100%	12.764.599	KASUBBID PENAGIHAN, PEMERIKSAAN DAN KEBERATAN
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2	15.280.000	2	16.648.000	2	16.969.809	2	17.423.061	2	17.626.856	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	4	55.168.000	4	37.308.000	4	38.029.172	4	39.044.904	4	39.501.607	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12	428.559.000	12	131.162.000	12	133.697.393	12	137.268.355	12	138.873.964	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.04.2.01. 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	10	264.871.000	10	40.320.000	10	41.099.395	10	42.197.130	10	42.690.704	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01. 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	12 Laporan	12	2.443.564.760	12	965.395.500	12	984.056.800	12	1.010.340.562	12	1.022.158.633	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01. 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	4	30.714.500	4	17.277.500	4	17.611.478	4	18.081.868	4	18.293.369	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01. 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4 Laporan	4	110.189.500	4	72.689.500	4	74.094.606	4	76.073.619	4	76.963.442	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01. 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8300 Obyek Pajak	8.300	59.787.000	8.300	67.210.500	8.300	68.509.620	8.300	70.339.540	8.300	71.162.292	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.04.2.01. 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Dokumen	3	174.923.900	9	158.021.000	9	161.075.845	9	165.377.729	9	167.311.875	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01. 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Layanan	11	47.733.000	9	46.603.000	9	47.503.847	9	48.772.641	9	49.343.128	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01. 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10	904.315.000	10	845.491.000	10	861.834.754	10	884.853.740	10	895.203.753	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01. 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	4	6.069.000	4	22.249.000	4	22.679.078	4	23.284.820	4	23.557.179	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01. 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	4	181.832.500	4	212.782.400	4	216.895.154	4	222.687.968	4	225.292.462	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.04.2.01. 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	4	25.514.000	4	24.111.000	4	24.577.072	4	25.233.785	4	25.529.198	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.04.2.01. 0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													SEKBAN
	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	75%	78%	71.741.927.901	80%	67.922.569.267	82%	68.886.918.159	84%	70.726.837.679	86%	71.554.119.514	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													KASUBBAG PERENCANAAN
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	87.538.900	100%	95.334.300	100%	97.177.136	100%	99.772.667	100%	100.939.695	
	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	100%	100%	13.233.500	100%	14.298.200	100%	14.574.587	100%	14.963.864	100%	15.138.894	
5.02.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9	19.800.000	9	15.999.800	9	16.309.080	9	16.744.684	9	16.940.544	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	10.216.800	1	20.517.000	1	20.913.599	1	21.472.186	1	21.723.343	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	8.258.200	1	17.852.600	1	18.197.695	1	18.683.743	1	18.902.284	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	9.394.500	1	10.980.500	1	11.192.756	1	11.491.706	0	11.626.124	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.01. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	11.264.200	1	10.662.200	1	10.868.303	1	11.158.588	1	11.289.108	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8	22.044.300	8	11.768.400	8	11.995.886	8	12.316.288	8	12.460.350	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	19	13.233.500	19	14.298.200	19	14.574.587	19	14.963.864	19	15.138.894	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.01. 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1	3.921.900	1	4.578.800	1	4.667.309	1	4.791.970	1	4.848.021	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.01. 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	1	2.639.000	1	2.975.000	1	3.032.507	1	3.113.504	1	3.149.922	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													KASUBBAG KEUANGAN
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	62.437.159.607	100%	62.540.532.207	100%	63.749.455.935	100%	65.452.157.537	100%	66.217.742.158	
5.02.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	78	61.731.550.007	80	61.731.550.007	80	62.924.835.909	80	64.605.512.503	80	65.361.194.033	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	672.351.200	12	770.490.800	12	785.384.578	12	806.361.635	12	815.793.537	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.02. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2	18.888.200	2	22.065.800	2	22.492.337	2	23.093.092	2	23.363.208	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.02. 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	18	14.370.200	18	16.425.600	18	16.743.111	18	17.190.307	18	17.391.380	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.02. 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													KASUBBAG KEUANGAN
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	100%	100%	39.799.500	100%	44.793.500	100%	45.659.369	100%	46.878.898	100%	47.427.234	
5.02.01.2.03. 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2	6.740.000	2	8.425.200	2	8.588.061	2	8.817.442	2	8.920.579	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.03. 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.03. 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.03. 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4	13.705.400	4	14.520.000	4	14.800.675	4	15.195.991	4	15.373.736	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2	19.354.100	2	21.848.300	2	22.270.633	2	22.865.466	2	23.132.920	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.03. 0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAI AN
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas	100%	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	101.933.025	100%	104.655.582	100%	105.879.725	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Tersusunnya laporan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100%	100%	135.711.000	100%	109.069.500	100%	111.177.840	100%	114.147.320	100%	115.482.486	
5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12	135.711.000	12	109.069.500	12	111.177.840	12	114.147.320	12	115.482.486	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.05. 0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10	80.000.000	11	100.000.000	12	101.933.025	13	104.655.582	14	105.879.725	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAI N
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Umum Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	100%	1.451.847.800	100%	1.412.513.300	100%	1.439.817.532	100%	1.478.274.022	100%	1.495.565.191	
5.02.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	28.629.500	12	28.625.000	12	29.178.328	12	29.957.660	12	30.308.071	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	56.023.000	12	60.045.500	12	61.206.194	12	62.840.968	12	63.576.010	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	98.517.500	12	64.100.000	12	65.339.069	12	67.084.228	12	67.868.903	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	70.383.800	12	88.126.800	12	89.830.313	12	92.229.616	12	93.308.413	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.06. 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	1.198.294.000	12	1.171.616.000	12	1.194.263.627	12	1.226.161.549	12	1.240.503.794	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAI AN
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Yang Berkualitas	100%	100%	3.780.842.000	100%	470.018.000	100%	130.492.620	100%	133.977.984	100%	135.545.106	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	.	.	.		.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	1.927.825.000	3	342.000.000	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	.	.	.		.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	.	.	.		.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95 Unit	20	169.388.000	40	-	44	0	48	0	53	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	.	.	.		.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07. 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	.	.	.		.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07. 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	.	.	.		.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	.	.	.		.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	71 Unit	67	1.683.629.000	73	128.018.000	80	130.492.620	88	133.977.984	97	135.545.106	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIA N
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	100%	100%	1.929.995.594	100%	1.969.372.760	100%	2.007.441.223	100%	2.061.058.533	100%	2.085.166.454	
5.02.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	376.825.594	48	381.852.760	48	389.234.068	48	399.630.230	48	404.304.650	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13	1.553.170.000	13	1.587.520.000	13	1.618.207.155	13	1.661.428.303	13	1.680.861.803	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAI AN
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan	100%	100%	1.785.800.000	100%	1.275.707.000	100%	1.300.366.732	100%	1.335.098.592	100%	1.350.715.058	
5.02.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	38.990.000	1	38.990.000	1	39.743.686	1	40.805.212	1	41.282.505	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	60	724.000.000	63	724.000.000	69	737.995.099	76	757.706.417	84	766.569.206	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09. 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09. 0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09. 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	40		-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	145	113.558.000	158	113.562.000	173	115.757.182	190	118.848.973	209	120.239.133	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09. 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09. 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2	744.513.000	3	299.475.000	3	305.263.926	3	313.417.306	3	317.083.305	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	Targ et	Pa gu	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
5.02.01.2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	625 Unit	625	115.059.000	687	50.000.000	755	50.966.512	791	52.327.791	830	52.939.862	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	72	49.680.000	79	49.680.000	87	50.640.327	96	51.992.893	105	52.601.047	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
5.02.01.2.09. 0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub bab ini menjelaskan tentang subkegiatan strategis yang dirancang oleh BPKPAD Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Setiap subkegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah.

Subkegiatan ini juga menggambarkan peran BPKPAD sebagai institusi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset Daerah, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan Teknis dan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pelaksana teknis administrasi keuangan, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan fiskal daerah. Peran strategis ini menjadikan BPKPAD sebagai penggerak utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, pelaksanaan subkegiatan yang telah dipilih berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengonsolidasikan sumber daya dan memperkuat upaya pencapaian target pembangunan strategis daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar, serta memperhatikan konsistensi antara pelaksanaan urusan Keuangan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah.

Penetapan Program/Kegiatan dan sub kegiatan ini memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029, kebutuhan strategis masyarakat, serta urgensi peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas dan Kemandirian Fiskal.

Pada RPJMN, Asta Cita 7 menekankan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan fokus pada Tata Kelola berbasis elektronik, yakni mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik dan melayani dan Optimalisasi Aset, yakni mengusahakan aset untuk aktivitas ekonomi sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah yang akuntabel dan pembangunan. Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berperan aktif dalam mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik dan melayani dan Optimalisasi Aset dengan memperkuat sistem tata Kelola berbasis elektronik yang transparan dan akuntabel, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel professional, dan berintegritas dan profesional, serta meningkatkan integritas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Program BANJAR MELAYANI yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar memiliki fokus utama pada pelayanan publik yang handal dan tata kelola berbasis elektronik. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan pelayanan publik yang terintegrasi, yang mampu langsung menjangkau kebutuhan masyarakat Kabupaten Banjar, serta untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

Program AMANAH yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar memiliki fokus utama pada Optimalisasi Aset, yakni mengusahakan aset untuk aktivitas ekonomi sebagai upaya Peningkatan ekonomi daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintah.

Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penyusunan sistem informasi yang terintegrasi dan pemanfaatan aplikasi berbasis digital menjadi prioritas utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan terbuka.

Melalui dukungan terhadap kedua program prioritas ini, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar akan berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang

sejalan dengan kebijakan nasional. serta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. memperkuat transparansi. dan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Selengkapnya uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan dapat dilihat pada table 4.3 di bawah ini

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Rincian Program	Sasaran/Outcome/Output	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Outcome/Output	Ket
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan		Meningkatnya tata kelola anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerapan Perda APBD	Banjar Amanah
		Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan		Persentase Perangkat Daerah Yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	
		Meningkatnya Penyerapan Belanja Daerah		Indeks Penyerapan Belanja Daerah	
		Meningkatnya Komponen Pendukung Kondisi Keuangan		Indeks Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	
		Meningkatnya Laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	
	Tata Kelola berbasis elektronik, yakni mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik dan melayani	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Indeks Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	
		Meningkatnya Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Dalam APBD		Indeks Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Dalam APBD	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	

		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	

		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	
		Terimplementasinya Penatausahaan Belanja Pegawai	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai	
		Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penatausahaan Perangkat daerah Yang Berkualitas	
		Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga		Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	
		Tercapainya Penyerapan APBD		Persentase Penyerapan APBD	
		Tersalurnya Belanja Daerah		Persentase Penyaluran Belanja Daerah	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
		Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	

		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	

		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
		Tersedianya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas laporan keuangan Perangkat daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah	
		Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
		Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan		Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	

		Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan		Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	
		Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan pembiayaan		Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	

		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
		Tersedianya Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
		Terlaksananya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	

		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang dibina	
		Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	
		Tercapainya Penyerapan APBD	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Penyerapan APBD	
		Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	

		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	
		Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
		Terkelolanya Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	
		Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	
		Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Aset yakni mengusahakan aset untuk aktivitas ekonomi sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah	Meningkatnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Aset	Banjar Amanah
		Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Kabupaten	Pengelolaan Barang Milik daerah	Persentase realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	
		Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan		Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tepat waktu		Persentase waktu penetapan rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	
		tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian		persentase penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian yang tepat waktu	
		Terealisasinya Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD		persentase Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	
		Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD		Persentase sertifikat dokumen kepemilikan BMD berupa tanah	
		Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD		Persentase materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	

		Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD		Persentase jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	
		Tersusunnya laporan Semester I dan II Penatausahaan BMD		Persentase penyampaian Laporan BMD Semester I dan II BMD tepat waktu dan sesuai ketentuan	
		Terpenuhinya tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD		Persentase tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	
		Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan		Persentase tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	
		Tersedianya Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	

		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Terhadap PAD	Banjar Intan Maju
		Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah		Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD	

		Terlaksananya penyusunan perencanaan pengelolaan pajak daerah		Persentase penyusunan perencanaan pengelolaan pajak daerah	
		Terlaksananya penyusunan dokumen peraturan perundang-undangan pajak daerah		Persentase penyusunan dokumen peraturan daerah dan kebijakan pajak daerah	
		Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan pajak daerah		Persentase pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan pajak daerah	
		Terlaksana nya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Meningkatnya potensi wajib pajak daerah yang terdata		Persentase potensi wajib pajak daerah (9 jenis) yang terdata	
		Terlaksana nya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Persentase Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
		Terlaksananya penilaian PBB P2		Persentase objek pajak yang dinilai	
		Meningkatnya ketetapan wajib pajak daerah		Persentase Peningkatan ketetapan wajib pajak daerah	

		Meningkatnya pelayanan dan konsultasi pajak daerah		Persentase pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang ditindaklanjuti	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Persentase Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
		Meningkatnya realisasi penagihan wajib pajak daerah		Persentase realisasi penagihan wajib pajak daerah	
		Meningkatnya penyelesaian kebertan pajak daerah		Persentase keberatan pajak daerah yang ditindaklanjuti	
		Terselesaikannya Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah		Persentase wajib pajak yang diperiksa	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah		Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah Yang Terlaksana	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	

		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
		Terpenuhi Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
		Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	

		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	
		Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	
		Tersedia Dokumen Magister Resiko		Persentase Dokumen SPIP Sesuai Ketentuan	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	

		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Terlaksannya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Data Statistik Sektoral Daerah	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan</i>	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,	

		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas	
		Tersusunnya laporan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan</i>	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
		Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	

		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	
		Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	
		Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	

		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

1. Persentase Peningkatan Pajak Daerah adalah Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan tahunan penerimaan Pajak Daerah, termasuk PBJT Hiburan dan Kesenian, PBJT Makan dan Minum, PBJT Parkir, PBJT Perhotelan, PBJT Tenaga Listrik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame dan Pajak lainnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan minimal 5% per tahun mencerminkan upaya optimalisasi melalui Digitalisasi sistem pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan Edukasi dan pelayanan wajib pajak yang lebih baik.
2. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah adalah Indikator ini mencerminkan peningkatan penerimaan dari Retribusi Daerah Target 5% pertumbuhan tahunan dapat dicapai melalui Pembinaan sistem penagihan dan pencatatan retribusi dan Peningkatan kepatuhan pengguna layanan.
3. Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah ukuran akuntabilitas tertinggi atas laporan keuangan pemerintah daerah. Menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun, Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem pengendalian internal yang memadai. Untuk itu Opini WTP konsisten menjadi syarat wajib untuk menunjukkan tata kelola yang akuntabel merupakan indikator utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, Meningkatkan kepercayaan publik dan lembaga pengawas.
4. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menilai sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar menerapkan Perencanaan berbasis kinerja, Pengukuran dan evaluasi hasil Keterkaitan antara anggaran dan output. Nilai A berarti Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar menunjukkan tingkat akuntabilitas

sangat tinggi, dan Mendorong pelaksanaan manajemen kinerja yang lebih disiplin.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menilai kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di bidang Pendapatan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD). Survei rutin per tahun, fokus pada pelayanan publik di bidang Pendapatan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) dan selalu melakukan perbaikan layanan untuk meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di berikan sesuai target yang di tentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar setiap tahunnya. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dapat di lihat di bawah ini .

Tabel 4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	Persentase	5%	5%	5%	5%	5%	
2	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	Persentase	5%	5%	5%	5%	5%	
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	81,30	81,60	81,90	82,20	84,00	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	75%	78%	81%	85%	87%	

Sumber : BPKPAD, 2025

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci PD									
N o.	Indikator	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target Tahun					Ketera ngan
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen		4.50	4.55	4.60	4.65	4.70	Urusa n Pilihan
2	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persent ase		10.74	10.74	10.74	10.74	10.74	Fungsi penun jang Urusa n pemer intaha n (Peren cana an dan Kewan gan)
3	Rasio PAD	Persent ase		10.56	10.56	10.56	10.56	10.56	
4	Rasio Belanja urusan pemerinta h Umum (dikurangi transfer expenditur es)	Persent ase		62.63	63.13	63.63	64.13	64.13	
5	Opini laporan Keuangan	Jumlah		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persent ase		-0,15	-0,31	-0,46	-0,62	-0,77	Fungsi Penun jang urusan Pemer intaha n Umum (Man ajeme n Kewan gan)
7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran	Persent ase		25.26	24.36	23.46	22.56	21.66	

	PAD dalam APBD								
8	Manajeme n Aset	Jumlah		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
9	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun sebelumnya	Persentase		28.71	27.21	25.71	22.71	21.21	
10	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persentase		86.96	87.01	87.06	87.11	87.16	Fungsi Penun jang urusan Pemer intaha n Umum (Trans paran si dan Partisi pasi Publik)
11	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persentase		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasik	Persentase		10.74	10.74	10.74	10.74	10.74	

	an Melalui TKD								
13	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase		11.07	12.00	12.05	13.00	13.05	
14	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase		61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	
15	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase		11.47	11.56	11.70	11.80	11.95	
16	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
17	Persentase Penurunan SILPA	Persentase		2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel profesional dan berintegritas di Kabupaten Banjar. Dokumen ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika yang ada, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas dan Kemandirian Fiskal.

Dalam penyusunan Renstra ini, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik, pemenuhan hak-hak administrasi penduduk, serta penguatan sistem informasi yang lebih efektif dan efisien. Semua upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam akses layanan, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Keberhasilan dalam melaksanakan Renstra ini sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pihak terkait yang mendukung tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas dan Kemandirian Fiskal. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dan berkomitmen dalam menjalankan setiap program dan kegiatan yang telah disusun.

Selain itu, Renstra ini harus menjadi dokumen yang dinamis dan fleksibel, yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, evaluasi dan pemantauan kinerja secara berkala

sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana ini tetap relevan dengan tujuan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai penutup. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan Dengan dukungan semua pihak. diharapkan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat terwujud.

Martapura, 19 September 2025

Kepala BPKPAD

Kab. Banjar



Drs. Achmad Zulyadaini. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19660104 198602 1 004

L A M P I R A N



SCAN ME

Link : <https://bit.ly/LAMPIRANRENSTRA2025-2029>



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENSTRA-PD

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Renstra-PD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 4

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V : penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 September 2025

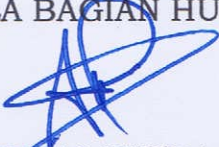
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001